



**SALINAN**

**MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI  
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK  
INDONESIA**

**NOMOR 117 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**INDEKS PERKEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI**

**MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, perlu menetapkan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5497);

3. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 192);

4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1256);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA TENTANG INDEKS PERKEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI.
- KESATU : Menetapkan Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang diukur berdasarkan indeks perkembangan:
- a. Satuan Permukiman yang selanjutnya disingkat SP;
  - b. Satuan Kawasan Pengembangan yang selanjutnya disingkat SKP;
  - c. Kawasan Perkotaan Baru yang selanjutnya disingkat KPB; dan
  - d. Kawasan Transmigrasi.
- KEDUA : Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertujuan untuk menetapkan status/indeks perkembangan SP, SKP, KPB dan Kawasan Transmigrasi, serta memberikan informasi mengenai inisiatif masyarakat, strategi pembangunan dan pengembangan, serta kebutuhan intervensi yang lebih akurat dalam rangka mewujudkan Kawasan Transmigrasi sebagai satu kesatuan sistem pengembangan ekonomi wilayah yang berdaya saing.
- KETIGA : Pengukuran Indeks Perkembangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berdasarkan dimensi:
- a. ekonomi;
  - b. sosial budaya;
  - c. lingkungan;
  - d. jejaring prasarana dan sarana, dan;
  - e. kelembagaan.
- KEEMPAT : Dimensi dan Peubah dalam Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri atas:
- a. SP:
    - 1) Dimensi Ekonomi dengan Peubah:
      - a) ekonomi wilayah SP;
      - b) pertokoan dan warung;
      - c) pelayanan bank dan/atau LKBB;
      - d) pelibatan masyarakat dan usaha mikro kecil dan menengah dalam pengembangan pola usaha pokok dan komoditas unggulan;
      - e) promosi komoditas unggulan;
      - f) pembagian lahan bagi transmigran;
      - g) sertifikasi tanah bagi transmigran;
      - h) sertifikasi tanah bagi penduduk setempat;
      - i) tingkat pemanfaatan lahan; dan
      - j) kepemilikan dan/atau penguasaan lahan.

- 2) Dimensi Sosial Budaya dengan Peubah:
  - a) kegiatan gotong royong;
  - b) kriminalitas;
  - c) keberadaan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
  - d) pemberantasan buta aksara atau kegiatan kelompok belajar (kejar paket A, paket B, dan paket C);
  - e) ketersediaan tenaga kependidikan tingkat dasar;
  - f) ketersediaan tenaga medis;
  - g) ketersediaan tenaga rohaniawan;
  - h) migrasi penduduk ke luar SP untuk mencari nafkah;
  - i) kerekatan sosial;
  - j) kasus pertanahan; dan
  - k) keberadaan *local champion* (agen perubahan);
- 3) Dimensi Lingkungan dengan Peubah:
  - a) tata ruang SP;
  - b) ketersediaan MCK;
  - c) pengelolaan sampah;
  - d) kejadian luar biasa;
  - e) kapasitas mitigasi kebencanaan;
  - f) pemanfaatan *amenity resources* (sumber daya keindahan dan kenyamanan);
  - g) kesadaran masyarakat terhadap permasalahan dan pemanfaatan lingkungan; dan
  - h) penerapan prinsip konservasi dalam pengelolaan lahan;
- 4) Dimensi Jejaring Prasarana dan Sarana dengan Peubah:
  - a) konektivitas lingkungan permukiman;
  - b) ketersediaan angkutan umum;
  - c) sumber daya air minum dan mandi/cuci masyarakat;
  - d) keberadaan sekolah dasar umum dan/atau sederajat;
  - e) ketersediaan pos pendidikan anak usia dini;
  - f) keberadaan pos kesehatan desa;
  - g) sarana peribadatan;
  - h) elektrifikasi desa;
  - i) bahan bakar untuk keperluan memasak;
  - j) ketersediaan dan kualitas fasilitas komunikasi seluler;
  - k) keberadaan kantor SP/kantor desa; dan
  - l) sarana pusat percontohan.
- 5) Dimensi Kelembagaan dengan Peubah:
  - a) pasar mingguan;
  - b) koperasi;
  - c) keberadaan BUM Desa;
  - d) keberadaan kelompok tani dan nelayan;
  - e) keberadaan organisasi kemasyarakatan;
  - f) sistem keamanan lingkungan atas inisiatif warga;
  - g) keberadaan pos pelayanan terpadu; dan

- h) penunjukan penanggung jawab pelaksanaan pengembangan SP.
- b. SKP:
- 1) Dimensi Ekonomi dengan Peubah:
    - a) pengembangan komoditas unggulan SKP;
    - b) pelibatan masyarakat dan usaha mikro kecil dan menengah dalam pengembangan komoditas unggulan SKP/klaster;
    - c) peran BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama mengembangkan komoditas unggulan;
    - d) pengembangan jejaring SKP/klaster;
    - e) promosi komoditas unggulan oleh SKP/klaster;
    - f) tingkat melek keuangan masyarakat; dan
    - g) kepemilikan dan/atau penguasaan lahan.
  - 2) Dimensi Sosial Budaya dengan Peubah:
    - a) kreativitas masyarakat;
    - b) pelibatan pelaku seni dan budaya;
    - c) pemanfaatan produk budaya masyarakat;
    - d) migrasi penduduk keluar kawasan;
    - e) governansi budaya;
    - f) budaya dan pendidikan;
    - g) budaya informasi dan pengetahuan;
    - h) budaya dan perencanaan;
    - i) budaya, kesetaraan dan inklusi sosial; dan
    - j) kerekatan sosial.
  - 3) Dimensi Lingkungan dengan Peubah:
    - a) pembangunan Kawasan Transmigrasi mengacu pada Tata Ruang SKP;
    - b) ruang terbuka hijau SKP;
    - c) pemanfaatan *amenity resources* untuk kegiatan ekonomi dan sosial SKP;
    - d) kesadaran masyarakat SKP terhadap permasalahan dan pemanfaatan lingkungan;
    - e) adaptasi terhadap perubahan iklim masyarakat di SKP;
    - f) kapasitas mitigasi bencana;
    - g) pengelolaan dan pemanfaatan sampah di SKP; dan
    - h) pengelolaan dan pemanfaatan limbah di SKP.
  - 4) Dimensi Jejaring Prasarana dan Sarana dengan Peubah:
    - a) konektivitas antar SP dalam SKP dan antar SKP/PPLT yang berdekatan;
    - b) angkutan umum;
    - c) sumber daya air minum dan mandi/cuci masyarakat di Kawasan Transmigrasi;
    - d) keberadaan sekolah lanjutan pertama atau sederajat;
    - e) keberadaan pusat kesehatan masyarakat;
    - f) sarana rekreasi dan pengembangan kebudayaan;
    - g) ketersediaan bahan bakar;
    - h) elektrifikasi SKP;
    - i) pemanfaatan alat komunikasi dan internet; dan
    - j) ketersediaan kantor pelayanan pemerintahan.

- 5) Dimensi Kelembagaan dengan Peubah:
  - a) pasar harian;
  - b) keberadaan gabungan kelompok tani/nelayan/peternak/pekebun;
  - c) keberadaan BUM Desa bersama;
  - d) keberadaan lembaga perbankan dan lembaga keuangan mikro;
  - e) keberadaan lembaga pembina keamanan dan ketertiban masyarakat; dan
  - f) keberadaan lembaga penanggung jawab pelaksanaan pengembangan SKP;
- c. KPB:
  - 1) Dimensi Ekonomi dengan Peubah:
    - a) pengembangan komoditas unggulan;
    - b) pelibatan masyarakat dan usaha mikro kecil dan menengah dalam pengembangan komoditas unggulan;
    - c) pengembangan jejaring antara KPB dengan pusat kegiatan dan kawasan lainnya;
    - d) promosi investasi KPB;
    - e) promosi produk unggulan yang diproduksi KPB;
    - f) sertifikasi/standarisasi produk yang dihasilkan;
    - g) tingkat melek keuangan masyarakat; dan
    - h) perkembangan ekonomi KPB;
  - 2) Dimensi Sosial Budaya dengan Peubah:
    - a) kreativitas masyarakat;
    - b) pelibatan pelaku seni dan budaya;
    - c) pemanfaatan produk budaya masyarakat;
    - d) budaya dan perencanaan;
    - e) budaya, kesetaraan dan inklusi sosial; dan
    - f) kerekatan sosial;
  - 3) Dimensi Lingkungan dengan Peubah:
    - a) penyediaan zonasi di KPB;
    - b) ruang terbuka hijau;
    - c) penyediaan ruang publik;
    - d) kesadaran masyarakat terhadap permasalahan dan pemanfaatan lingkungan;
    - e) adaptasi terhadap perubahan iklim;
    - f) kapasitas mitigasi bencana;
    - g) pengelolaan dan pemanfaatan sampah;
    - h) pengelolaan dan pemanfaatan limbah; dan
    - i) sistem drainase perkotaan.
  - 4) Dimensi Jejaring Prasarana dan Sarana dengan Peubah:
    - a) konektivitas antara KPB, pusat kegiatan dan kawasan lain;
    - b) konektivitas antara KPB dan *hinterland* dalam Kawasan Transmigrasi;
    - c) sekolah menengah kejuruan;
    - d) pelayanan pendidikan vokasi dan keterampilan;
    - e) aksesibilitas ke dan dari KPB serta ke sentra komoditas unggulan;
    - f) angkutan umum;

- g) elektrifikasi KPB;
  - h) pemanfaatan alat komunikasi dan internet;
  - i) sumber air minum dan mandi/cuci masyarakat di KPB;
  - j) ketersediaan bahan bakar;
  - k) rumah ibadah/Islamic center; dan
  - l) puskesmas rawat inap;
- 5) Dimensi Kelembagaan dengan Peubah:
- a) insentif/kebijakan daerah tentang investasi di KPB;
  - b) kebijakan daerah dalam pengembangan KPB yang telah ditetapkan;
  - c) komitmen pemerintah untuk pembiayaan KPB yang telah ditetapkan;
  - d) pengembangan kerja sama antara pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi/lembaga penelitian dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengembangkan inovasi untuk pengembangan KPB; dan
  - e) kebijakan pemerintah pusat dan daerah tentang promosi KPB dan produk unggulannya.
- d. Kawasan Transmigrasi:
- 1) Dimensi Ekonomi dengan Peubah:
    - a) pengembangan komoditas unggulan Kawasan Transmigrasi;
    - b) pelibatan masyarakat dan usaha mikro kecil dan menengah dalam pengembangan komoditas unggulan;
    - c) peran BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama mengembangkan komoditas unggulan;
    - d) pengembangan jejaring Kawasan Transmigrasi/klaster;
    - e) promosi komoditas unggulan oleh Kawasan Transmigrasi/klaster;
    - f) sertifikasi dan/atau standarisasi produk yang dihasilkan;
    - g) tingkat melek keuangan masyarakat; dan
    - h) kepemilikan dan/atau penguasaan lahan.
  - 2) Dimensi Sosial Budaya dengan Peubah:
    - a) kreativitas masyarakat;
    - b) pelibatan pelaku seni dan budaya;
    - c) pemanfaatan produk budaya masyarakat;
    - d) migrasi penduduk keluar kawasan;
    - e) governansi budaya;
    - f) budaya dan pendidikan;
    - g) budaya, informasi dan pengetahuan;
    - h) budaya dan perencanaan;
    - i) budaya, kesetaraan dan inklusi sosial; dan
    - j) perekatan sosial.
  - 3) Dimensi Lingkungan dengan Peubah:
    - a) pembangunan yang mengacu pada Tata Ruang Kawasan Transmigrasi;
    - b) ruang terbuka hijau;
    - c) pemanfaatan *amenity resources* untuk kegiatan ekonomi dan sosial;

- d) kesadaran masyarakat terhadap permasalahan dan pemanfaatan lingkungan;
  - e) adaptasi terhadap perubahan iklim;
  - f) kapasitas mitigasi bencana;
  - g) pengelolaan dan pemanfaatan sampah; dan
  - h) pengelolaan dan pemanfaatan limbah.
- 4) Dimensi Jejaring Prasarana dan Sarana dengan Peubah:
- a) konektivitas Kawasan Transmigrasi dengan kota kecil/menengah (Pusat Pertumbuhan) yang hierarki keruangannya lebih tinggi;
  - b) konektivitas antar SKP dalam Kawasan Transmigrasi;
  - c) penyediaan sekolah menengah kejuruan;
  - d) pelayanan pendidikan vokasi dan keterampilan;
  - e) aksesibilitas ke dan dari kawasan serta ke sentra komoditas unggulan;
  - f) angkutan umum;
  - g) elektrifikasi kawasan;
  - h) pemanfaatan alat komunikasi dan internet;
  - i) sumber daya air minum dan mandi/cuci masyarakat di Kawasan Transmigrasi;
  - j) ketersediaan bahan bakar;
  - k) kios sarana produksi pertanian;
  - l) pasar Kawasan Transmigrasi; dan
  - m) perbankan dan/atau lembaga keuangan bukan bank untuk pengembangan komoditas unggulan.
- 5) Dimensi Kelembagaan dengan Peubah:
- a) kebijakan pemerintah daerah kabupaten/kota dan/atau norma masyarakat dalam meminimalisasi alih fungsi lahan;
  - b) kebijakan daerah tentang penggunaan tenaga kerja lokal;
  - c) pengembangan Kawasan Transmigrasi/klaster berbasis komoditas unggulan;
  - d) insentif/kebijakan daerah tentang investasi;
  - e) forum pengembangan (ekonomi) daerah/Kawasan Transmigrasi di aras Kabupaten/Kota;
  - f) kebijakan daerah dalam pengembangan Kawasan Transmigrasi yang telah ditetapkan;
  - g) komitmen daerah untuk pembiayaan kawasan yang telah ditetapkan;
  - h) kebijakan daerah tentang *corporate social responsibility* untuk pengembangan kawasan yang telah ditetapkan;
  - i) pengembangan kerja sama antara pemerintah daerah, BUM Desa/BUM Desa bersama, dunia usaha, dan perguruan tinggi/lembaga penelitian setempat untuk meningkatkan inovasi pengembangan komoditas unggulan;
  - j) kebijakan pemerintah daerah tentang promosi Kawasan; dan

k) badan pengelola kawasan yang berfungsi mengelola Kawasan Transmigrasi secara menyeluruh dari berbagai aspek.

KELIMA : Hasil pengukuran indeks perkembangan SP, SKP, KPB, dan Kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT menjadi dasar penetapan status perkembangan SP, SKP, KPB, dan Kawasan Transmigrasi yang masing-masing terdiri atas nilai ambang batas:

a. SP:

- 1) Nilai Indeks Perkembangan SP kurang dari 50 (lima puluh) dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan sejak penempatan, diberikan status penyesuaian;
- 2) Nilai Indeks Perkembangan SP 50 (lima puluh) sampai dengan 75 (tujuh puluh lima) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak penempatan, diberikan status pemantapan;
- 3) Nilai Indeks Perkembangan SP lebih besar dari 75 (tujuh puluh lima) dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak penempatan, diberikan status kemandirian; dan
- 4) Nilai Indeks Perkembangan SP lebih besar dari 75 (tujuh puluh lima) dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak penempatan dengan tambahan prasarana yaitu Sekolah Menengah Pertama atau yang sederajat, Pusat Kesehatan Masyarakat, Pasar Harian, taman rekreasi dan balai pertemuan, diberikan status SP utama.

b. SKP:

- 1) Nilai Indeks Perkembangan SKP kurang dari 50 (lima puluh) diberikan status kurang berkembang;
- 2) Nilai Indeks Perkembangan SKP 50 (lima puluh) sampai dengan 75 (tujuh puluh lima), diberikan status cukup berkembang; dan
- 3) Nilai Indeks Perkembangan SKP lebih besar dari 75 (tujuh puluh lima) diberikan status berkembang.

c. KPB:

- 1) Nilai Indeks Perkembangan KPB kurang dari 50 (lima puluh) diberikan status berkembang;
- 2) Nilai Indeks Perkembangan KPB 50 (lima puluh) sampai dengan 75 (tujuh puluh lima), diberikan status mandiri; dan
- 3) Nilai Indeks Perkembangan KPB lebih besar dari 75 (tujuh puluh lima) diberikan status berdaya saing.

d. Kawasan Transmigrasi:

- 1) Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi kurang dari 50 (lima puluh) diberikan status berkembang;
- 2) Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi 50 (lima puluh) sampai dengan 75 (tujuh puluh lima) diberikan status mandiri; dan
- 3) Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi lebih besar dari 75 (tujuh puluh lima) diberikan status berdaya saing.

- KEENAM : Peubah, indikator, cara pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, penentuan status, dan rekomendasi indikasi kegiatan pengembangan untuk pengukuran indeks perkembangan SP, SKP, KPB, dan Kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA tercantum dalam buku panduan dan *compact disc* sebagai Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETUJUH : Peubah, indikator, cara pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, penentuan status, dan rekomendasi indikasi kegiatan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM merupakan data penyajian *realtime* atau *dashboard* melalui *updating* data secara terus menerus.
- KEDELAPAN : Pelaksanaan evaluasi tingkat perkembangan Kawasan Transmigrasi dapat dilakukan menggunakan metode evaluasi sistem cepat dengan tetap memperhatikan peubah, indikator, tata cara pengumpulan data, tata cara pengolahan dan analisis data, tata cara penentuan status dan rekomendasi indikasi kegiatan pengembangan.
- KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Desember 2021

MENTERI DESA,  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN  
TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDUL HALIM ISKANDAR

Salinan sesuai aslinya  
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi  
Kepala Biro Hukum



Teguh

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI DESA,  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN  
TRANSMIGRASI  
NOMOR 117 TAHUN 2021  
TENTANG  
INDEKS PERKEMBANGAN KAWASAN  
TRANSMIGRASI

- I. INDEKS PERKEMBANGAN SP
  - 1.1. Dimensi, Peubah, dan Indikator.
  - 1.2. Tata Cara Pengumpulan Data.
  - 1.3. Tata Cara Pengolahan dan Analisis Data.
  - 1.4. Tata Cara Penentuan Status SP.
  - 1.5. Rekomendasi Indikasi Kegiatan Pengembangan SP.
- II. INDEKS PERKEMBANGAN SKP
  - 2.1. Dimensi, Peubah, dan Indikator.
  - 2.2. Tata Cara Pengumpulan Data.
  - 2.3. Tata Cara Pengolahan dan Analisis Data.
  - 2.4. Tata Cara Penentuan Status SKP.
  - 2.5. Rekomendasi Indikasi Kegiatan Pengembangan SKP.
- III. INDEKS PERKEMBANGAN KAWASAN PERKOTAAN BARU;
  - 3.1. Dimensi, Peubah, dan Indikator.
  - 3.2. Tata Cara Pengumpulan Data.
  - 3.3. Tata Cara Pengolahan dan Analisis Data.
  - 3.4. Tata Cara Penentuan Status KPB.
  - 3.5. Rekomendasi Indikasi Kegiatan Pengembangan KPB.

- IV. INDEKS PERKEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI;
  - 4.1. Dimensi, Peubah, dan Indikator.
  - 4.2. Tata Cara Pengumpulan Data.
  - 4.3. Tata Cara Pengolahan dan Analisis Data.
  - 4.4. Tata Cara Penentuan Status Kawasan Transmigrasi.
  - 4.5. Rekomendasi Indikasi Kegiatan Pengembangan Kawasan Transmigrasi.

I. INDEKS PENILAIAN SP

Tabel 1.1. Dimensi, Peubah, dan Indikator

No.	Peubah	Indikator
<b>A. DIMENSI EKONOMI</b>		
1.	Ekonomi Wilayah SP	Pola usaha pokok belum berkembang
		Pola usaha pokok sudah berkembang dan mencukupi kebutuhan subsistem
		Pola usaha pokok mulai dikembangkan pada industri pengolahan berbasis pertanian, industri mikro bidang kulit, kayu, anyaman, gerabah/keramik
		Pola usaha pokok sudah dikembangkan dari mulai pertanian, industri pengolahan dan jasa
2.	Pertokoan dan Warung	Tidak ada pertokoan dan warung
		Ada warung/toko/kedai tapi belum dapat melayani kebutuhan sehari-hari masyarakat di SP
		Ada warung/toko/kedai sudah dapat melayani kebutuhan sehari-hari masyarakat di SP
3.	Pelayanan Bank dan/atau LKBB	Tidak ada pelayanan bank
		Ada pelayanan Bank Umum dan/atau BPR atau LKBB tapi hanya melayani masyarakat SP kurang dari 25%
		Ada pelayanan Bank Umum dan/atau BPR atau LKBB dan sudah melayani masyarakat SP lebih dari 25%
4.	Pelibatan Masyarakat dan UMKM dalam pengembangan pola usaha pokok dan komoditas unggulan	Hanya sebagian kecil masyarakat dan UMKM yang terlibat dalam pengembangan pola usaha pokok dan/atau komoditas unggulan secara teroganisir oleh klaster (hanya kurang dari 25%)
		Sekitar 25% - 50% masyarakat dan UMKM dilibatkan dalam pengembangan pola usaha pokok dan/atau komoditas unggulan secara teroganisir oleh klaster

No.	Peubah	Indikator
		Lebih dari 50% masyarakat dan UMKM dilibatkan dalam pengembangan pola usaha pokok dan/atau komoditas unggulan secara teroganisir oleh klaster
5.	Promosi komoditas unggulan	SP belum mempromosikan komoditas unggulan SP sudah mempromosikan komoditas unggulan dalam skala lokal (kabupaten/kota dan provinsi) SP sudah mempromosikan komoditas unggulan dalam skala nasional SP sudah mempromosikan komoditas unggulan dalam skala internasional
6.	Pembagian lahan bagi transmigran	Belum menerima lahan Menerima hanya lahan pekarangan Menerima lahan pekarangan dan LU I Menerima LP, LU I dan LU II
7.	Sertifikasi tanah bagi transmigran	Belum ada yang menerima sertifikat Sudah menerima sertifikat tetapi hanya lahan pekarangan Sudah menerima sertifikat lahan pekarangan dan lahan usaha I Sudah menerima sertifikat lengkap (LP, LU I dan LU II)
8.	Sertifikasi tanah bagi penduduk setempat	Belum ada yang menerima sertifikat Sudah menerima sertifikat tetapi hanya lahan pekarangan Sudah menerima sertifikat lahan pekarangan dan lahan usaha I Sudah menerima sertifikat lengkap (LP, LU I dan LU II)
9.	Tingkat Pemanfaatan lahan	Kurang dari 25% lahan dimanfaatkan secara produktif 25% - 50% lahan dimanfaatkan secara produktif 50% - 75% lahan dimanfaatkan secara produktif Lebih dari 75% lahan dimanfaatkan secara produktif
10.	Pemilikan/penguasaan lahan	Lebih dari 50% lahan di SP dikuasai oleh penduduk atau perusahaan dari luar SP 25% - 50% lahan di SP dikuasai oleh penduduk atau perusahaan dari luar SP

No.	Peubah	Indikator
		Kurang dari 25% lahan di SP dikuasai oleh penduduk atau perusahaan dari luar SP
<b>B. DIMENSI SOSIAL BUDAYA</b>		
1.	Kegiatan Gotong Royong	Tidak ada Ada tetapi jarang dilakukan Ada dan dilakukan secara rutin sesuai dengan jadwal
2.	Kriminalitas	Tidak ada Ada tetapi cenderung berkurang Ada dan cenderung tetap Ada dan cenderung meningkat
3.	Keberadaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Tidak ada Ada tetapi cenderung berkurang Ada dan cenderung tetap Ada dan cenderung meningkat
4.	Pemberantasan Buta Aksara/Kegiatan Kelompok Belajar (Kejar) Paket A/B/C	Tidak ada Ada tetapi tidak terprogram Ada dilaksanakan secara rutin
5.	Ketersediaan Tenaga Kependidikan Tingkat Dasar	Tidak ada Ada, kurang dari 25% kebutuhan Ada, 25% - 50% kebutuhan Ada, lebih dari 50% kebutuhan
6.	Ketersediaan Tenaga Medis (paramedis)	Tidak ada Ada, secara berkala bulanan Ada, secara berkala mingguan Ada, secara berkala setiap hari
7.	Ketersediaan Tenaga Rohaniawan	Tidak ada Ada, belum sesuai dengan kebutuhan umat Ada, sesuai dengan kebutuhan umat

No.	Peubah	Indikator
8.	Migrasi penduduk ke luar SP untuk mencari nafkah	Lebih dari 25% penduduk bermigrasi ke luar SP untuk mencari nafkah Sekitar 10% - 25% penduduk bermigrasi ke luar SP untuk mencari nafkah Sedikit penduduk (kurang dari 10%) bermigrasi ke luar SP untuk mencari nafkah
9.	Kerekatan Sosial	Masyarakat di SP satu sama lain belum merasa menjadi masyarakat yang satu dan apabila terjadi konflik maka tidak ada mekanisme resolusi konflik yang baik Masyarakat di SP satu sama lain belum merasa menjadi masyarakat yang, namun apabila terjadi konflik sudah ada sedikit mekanisme resolusi konflik yang baik Masyarakat di SP satu sama lain sudah merasa menjadi masyarakat yang satu dan apabila terjadi konflik maka sudah ada mekanisme resolusi konflik yang baik
10.	Kasus pertanahan	Tidak ada kasus yang diadukan Ada, dan sebagian besar (lebih dari 50%) dapat diselesaikan Ada, dan sebagian (20% - 50%) sudah diselesaikan Ada kasus tapi penyelesaiannya lambat
11.	Keberadaan <i>local champion</i> (agen perubahan)	Di SP/Desa belum ada Di SP sudah ada <i>local champion</i> namun terbatas pada bidang tertentu Di SP/Desa sudah ada <i>local champion</i> yang mencakup seluruh bidang kehidupan masyarakat
<b>C. DIMENSI LINGKUNGAN</b>		
1.	Tata Ruang Satuan Permukiman	Peta Tata Ruang dan Peta Perwujudan Ruang Satuan Permukiman tidak tersedia di kantor SP Peta Tata Ruang dan Peta Perwujudan Ruang Satuan Permukiman tersedia di kantor SP namun belum dimanfaatkan sebagai pedoman dalam pengendalian pemanfaatan ruang Peta Tata Ruang dan Peta Perwujudan Ruang Satuan Permukiman tersedia di kantor SP dan dimanfaatkan sebagai pedoman dalam pengendalian pemanfaatan ruang

No.	Peubah	Indikator
2.	Ketersediaan MCK	<p>Belum ada sarana MCK yang layak</p> <p>Penduduk menggunakan sarana MCK bersama namun pelayanannya belum sesuai dengan jumlah penduduk</p> <p>Penduduk menggunakan sarana MCK bersama dan pelayanannya sudah sesuai dengan jumlah penduduk</p> <p>Setiap Rumah Tangga memiliki sarana MCK sendiri</p>
3.	Pengelolaan Sampah	<p>Dibuang di sembarang tempat (tanah lapang, kebun, sungai, selokan)</p> <p>Dibuang di lubang sampah, ditimbun atau dibakar</p> <p>Dibuang di TPS dan diangkut ke TPA</p> <p>Didaur ulang atau dibuat kompos atau diangkut ke TPA dan diolah menjadi bahan yang lebih bermanfaat misalnya pupuk organik</p>
4.	Kejadian Luar Biasa (KLB)	<p>Tidak ada</p> <p>Ada tetapi tidak ada yang meninggal</p> <p>Ada dan ada yang meninggal</p>
5.	Kapasitas Mitigasi Kebencanaan (Gempa Bumi, Banjir, Tanah Longsor, Tsunami, dll)	<p>Ada kemungkinan terjadi bencana alam tapi tidak ada irigasi</p> <p>Ada kemungkinan terjadi bencana alam dan sudah ada mitigasi</p> <p>Kawasan ini kemungkinan besar tidak terjadi bencana alam</p>
6.	Pemanfaatan Amenity Resources (sumber daya keindahan dan kenyamanan)	<p>Masyarakat desa belum memanfaatkan sumber daya keindahan dan kenyamanan (<i>amenity resources</i>) untuk pengembangan komoditas unggulan</p> <p>Masyarakat desa sudah memanfaatkan sumber daya keindahan dan kenyamanan (<i>amenity resources</i>) untuk pengembangan komoditas unggulan namun belum optimal</p> <p>Masyarakat desa secara optimal memanfaatkan sumber daya keindahan dan kenyamanan (<i>amenity resources</i>) untuk pengembangan komoditas unggulan</p>

No.	Peubah	Indikator
7.	Kesadaran Masyarakat terhadap Permasalahan dan Pemanfaatan Lingkungan	Masyarakat belum memiliki kesadaran dan pemahaman tentang permasalahan dan pemanfaatan lingkungan Masyarakat sudah memiliki kesadaran dan pemahaman tentang permasalahan dan pemanfaatan lingkungan Masyarakat sudah memiliki kesadaran dan pemahaman tentang permasalahan dan pemanfaatan lingkungan serta mempraktekan dalam kehidupan sehari-hari Masyarakat sudah memiliki kesadaran dan pemahaman tentang permasalahan dan pemanfaatan lingkungan serta menuangkannya ke dalam aturan (tertulis dan/atau tidak tertulis) dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari
8.	Penerapan Prinsip Konservasi Dalam Pengelolaan Lahan	Belum menerapkan Sudah menerapkan secara parsial Sudah menerapkan secara penuh
D. DIMENSI JEJARING PRASARANA DAN SARANA		
1.	Konektivitas Lingkungan Permukiman	Tanah Diperkeras Aspal/Beton dan dapat dilalui kendaraan roda 4 sepanjang tahun kecuali musim hujan Aspal/beton dan dapat dilalui kendaraan roda 4 sepanjang tahun kecuali waktu-waktu tertentu (pada saat hujan, air pasang, dll) Aspal/beton dan dapat dilalui kendaraan roda 4 sepanjang tahun
2.	Ketersediaan Angkutan Umum	Tidak ada angkutan umum Ada dengan trayek tidak tetap Ada tanpa trayek tetap Ada trayek tetap tapi tidak setiap hari

No.	Peubah	Indikator
3.	Sumber Air Minum, mandi dan cuci	Air hujan Sungai/danau/kolam Mata Air Sumur gali Sumur bor/pompa
4.	Keberadaan Sekolah Dasar (SD) Umum dan/atau MI	Tidak ada Ada dengan lokasi sekolah lebih dari 3 km Ada dengan lokasi sekolah kurang dari 3 km
5.	Ketersediaan Pos PAUD	Tidak ada Ada tapi belum dapat melayani penduduk seluruh SP Ada dan sudah dapat melayani penduduk seluruh SP
6.	Keberadaan Pos Kesehatan Desa (Poskesdes)	Tidak ada Poskesdes/Polindes Ada di SP/Desa lain dan sangat sulit dijangkau Ada di SP/Desa lain dan sulit dijangkau Ada dan lokasinya di dalam wilayah SP (desa)
7.	Sarana Peribadatan	Tidak tersedia Tersedia namun belum sesuai dengan kebutuhan Tersedia sesuai dengan kebutuhan
8.	Elektrifikasi Desa	0 - 25% 25% - 50% 51% - 75% > 75%
9.	Bahan Bakar untuk keperluan memasak	Minyak Tanah Kayu Bakar/Limbah Pertanian Gas Cair (LPG) Biogas
10.	Ketersediaan dan Kualitas Fasilitas Komunikasi Seluler	Tidak ada sinyal telepon seluler Ada sinyal telepon walaupun lemah Ada sinyal telepon dan kuat

No.	Peubah	Indikator
11.	Keberadaan Kantor SP/Kantor Desa	Tidak ada kantor SP/desa Ada kantor SP/desa tapi belum dapat melayani penduduk secara optimal Ada kantor SP/desa tapi dan sudah dapat melayani penduduk secara optimal
12.	Sarana pusat percontohan	Tidak tersedia Tersedia, belum dimanfaatkan secara maksimal Tersedia dan dimanfaatkan secara maksimal
<b>E. DIMENSI KELEMBAGAAN</b>		
1.	Pasar Mingguan	Tidak ada pasar (aktivitas dan bangunannya) Ada aktivitas pasar mingguan tetapi tidak ada bangunan pasar Ada aktivitas pasar mingguan dan ada bangunan pasar walaupun tidak permanen Ada aktivitas pasar mingguan dan ada bangunan pasar permanen
2.	Koperasi (KUD, Non KUD, Kopinkra, dll)	Tidak ada koperasi Ada koperasi tapi belum dapat sebagai penggerak ekonomi di SP Ada koperasi tapi belum dapat sebagai penggerak ekonomi di SP
3.	Keberadaan BUM Desa	Belum ada BUM Desa Sudah ada BUM Desa tetapi belum ada usahanya Sudah ada BUM Desa, sudah ada usahanya tetapi belum aktif berperan dalam pengembangan komoditas unggulan Sudah ada BUM Desa, sudah ada usahanya dan aktif berperan dalam pengembangan komoditas unggulan
4.	Keberadaan Kelompok Tani dan Nelayan	Belum ada kelompok tani Sudah ada kelompok tani tapi belum tergabung dalam Gapoktan Sudah ada kelompok tani dan sebagian kelompok tani tergabung dalam Gapoktan Sudah ada kelompok tani dan seluruh kelompok tani tergabung dalam Gapoktan

No.	Peubah	Indikator
5.	Keberadaan Organisasi Kemasyarakatan (PKK, Karang Taruna, LPMD, Kelompok Perempuan, Majelis Taklim Lembaga Adat, dll)	Tidak ada organisasi kemasyarakatan
		Ada organisasi kemasyarakatan sebagian besar bentukan pemerintah desa
		Ada organisasi kemasyarakatan bentukan pemerintah desa dan masyarakat
6.	Siskamling atas inisiatif warga	Tidak ada
		Ada, berkala
		Ada, dan rutin
7.	Keberadaan Posyandu	Tidak ada
		Ada tapi belum dapat melayani sebagian besar penduduk SP
		Ada dan sudah dapat melayani sebagian besar penduduk SP
8.	Penanggung jawab pelaksanaan pengembangan SP	Tidak ada
		Ada pelaksana pengembangan SP tetapi tidak ada penunjukan dan/atau penetapan dari Pemda
		Pemda membentuk unit kerja khusus sebagai pelaksana pengembangan SP

Tabel 1.2. Tata Cara pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam rangka pengukuran indeks perkembangan SP dilakukan secara luring dan daring.

1.2.1. Pengumpulan Data Secara Luring dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. fasilitator melakukan survei lapangan keseluruhan SP sebelum dilaksanakannya FGD dengan melakukan peninjauan/pengamatan lapangan dan wawancara secara mendalam dengan beberapa responden kunci
- b. mekanisme FGD dengan Peserta dan pelaksanaan FGD sebagai berikut:

Peserta	Pelaksanaan FGD
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kepala Desa setempat;</li><li>2. Para ketua RW;</li><li>3. Para Ketua RT;</li><li>4. Perwakilan Kelompok Organisasi Masyarakat (kader kesehatan, karang taruna, ketua kelompok tani, ketua kelompok nelayan, ketua kelompok sadar wisata dll);</li><li>5. Pendamping Desa/Pendamping SP;</li><li>6. Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, eks warga transmigran;</li><li>7. Stakeholders lainnya sesuai kebutuhan.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Fasilitator menjelaskan tentang pertanyaan-pertanyaan dari indikator yang telah disusun;</li><li>2. Fasilitator mempersilahkan kepada peserta untuk menanyakan hal-hal yang kurang jelas;</li><li>3. Setelah tanya jawab sekitar 30 menit, kemudian fasilitator mempersilahkan para peserta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah disediakan;</li><li>4. Peserta boleh mendiskusikan dengan para peserta lainnya yang berada dalam satu meja;</li><li>5. Jawaban dari peserta, dapat berupa jawaban dari masing-masing peserta ataupun merupakan jawaban dari satu meja;</li><li>6. Pendamping bertugas mencatat semua proses diskusi yang terjadi pada setiap meja.</li><li>7. Setelah peserta melakukan pengisian kuesioner, tahapan selanjutnya adalah melakukan rekapitulasi jawaban responden yang diinput ke dalam Microsoft Excel. Jawaban responden diinput berdasarkan Dimensi Ekonomi, Dimensi Sosial Budaya, Dimensi Lingkungan, Dimensi Prasarana dan Sarana, dan Dimensi Kelembagaan sesuai dengan form isian yang tersedia.</li></ol>

1.2.2. Pengumpulan Data Secara Daring dilakukan dengan menggunakan kuesioner berdasarkan dimensi, peubah, dan indikator sebagaimana terlampir.

Tabel 1.3. Tata Cara Pengolahan dan Analisis Data

No	Uraian
1.	<p>Pengolahan Data</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Data dari kuesioner dan hasil pengamatan dituangkan ke dalam tabel data</li><li>b. Nilai gabungan dari masing masing indikator digunakan dengan cara penghitungan modus</li><li>c. justifikasi atau verifikasi dapat dilakukan oleh fasilitator terhadap beberapa indikator-indikator sesuai dengan hasil wawancara dan hasil pengamatan lapangan</li></ul>
2.	<p>Analisis data</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Analisis data menggunakan software PRAPSP yang berbasis multi dimensional scaling (MDS)</li><li>b. Analisis data berupa status perkembangan dimensi analisis atribut pengungkit (<i>leverage attributes</i>) dan (<i>analisis montercarlo</i>)</li><li>c. Penentuan bobot masing masing dimensi</li></ul>

Tabel 1.4. Tata Cara Penentuan Status SP

No	Uraian
1.	<p>Perhitungan Indeks SP</p> $IPSP = \sum W_i \times D_i$ <p>Dimana IPSP= Indeks Perkembangan Satuan Permukiman <math>W_i</math> = Bobot masing masing dimensi <math>D_i</math> = Nilai masing masing dimensi</p>
2.	<p>Penentuan Status SP</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Nilai IPSP &lt; 50 dengan waktu Maksimum 1,5 tahun pasca penempatan statusnya Penyesuaian</li><li>b. Nilai IPSP <math>50 \leq IPSP &lt; 75</math> dengan waktu Maksimum 3 tahun pasca penempatan statusnya Pemantapan</li><li>c. Nilai IPSP <math>\geq 75</math> dengan waktu Maksimum 5 tahun pasca penempatan statusnya Kemandirian</li><li>d. Nilai IPSP <math>\geq 75</math> dengan waktu Maksimum 5 tahun pasca penempatan dengan tambahan prasarana: SMP, Puskesmas, Pasar Harian, taman rekreasi dan balai pertemuan statusnya SP Utama (Pusat SKP)</li></ul>

Tabel 1.5. Rekomendasi Indikasi Kegiatan Pengembangan SP

No	Uraian
1.	Rekomendasi Indikasi Kegiatan disusun berdasarkan atribut pengungkit dari dimensi ekonomi, Sosial Budaya, Lingkungan, Jejaring Prasarana dan Sarana, dan Kelembagaan.
2.	Rekomendasi berupa Indikasi Kegiatan untuk masing masing dimensi dari hasil penilaian lapangan yang memuat acuan rencana kegiatan dalam jangka waktu tertentu

II. INDEKS PENILAIAN SKP

Tabel 2.1. Dimensi, Peubah, dan Indikator

No.	Peubah	Indikator
A. DIMENSI EKONOMI		
1.	Pengembangan Komoditas Unggulan SKP	Komoditas unggulan belum dikembangkan
		Komoditas unggulan sudah dikembangkan namun masih parsial (produksi saja, pengolahan saja, atau pemasaran saja)
		Komoditas unggulan sudah dikembangkan secara terpadu dari produksi, pengolahan dan pemasaran
		Komoditas unggulan sudah dikembangkan secara terpadu dari produksi, pengolahan sampai pemasaran dan berkaitan dengan sektor lain
2.	Pelibatan Masyarakat dan UMKM dalam Pengembangan Komoditas Unggulan SKP/Klaster	Hanya sebagian kecil masyarakat (kurang dari 25%), koperasi dan UMKM yang terlibat dalam pengembangan komoditas unggulan secara terorganisir oleh klaster
		Sekitar 25% - 50% masyarakat, koperasi dan UMKM dilibatkan dalam pengembangan komoditas unggulan secara terorganisir oleh klaster
		Lebih dari 50% masyarakat, koperasi dan UMKM dilibatkan dalam pengembangan komoditas unggulan secara terorganisir oleh klaster
3.	Peran BUM Desa dan atau BUM Desa bersama Mengembangkan Komoditas Unggulan	BUM Desa dan atau BUM Desa bersama belum mendukung pengembangan komoditas unggulan
		BUM Desa dan atau BUM Desa bersama sudah mendukung pengembangan komoditas unggulan tapi masih parsial
		BUM Des dan atau BUM Desa bersama sudah mengembangkan komoditas unggulan sudah secara terpadu dari produksi, pengolahan sampai pemasaran dan berkaitan dengan sektor lainnya

No.	Peubah	Indikator
4.	Pengembangan Jejaring SKP/klaster	Tidak ada keterkaitan antara SKP/klaster/kawasan perdesaan dengan kawasan lainnya dalam rangka pengembangan komoditas unggulan Ada keterkaitan antara SKP/klaster/kawasan perdesaan dengan kawasan lainnya dalam rangka pengembangan komoditas unggulan walaupun belum berkembang dengan baik Ada keterkaitan antara SKP/klaster/kawasan perdesaan dengan kawasan lainnya dalam rangka pengembangan komoditas unggulan dan sudah berkembang dengan baik
5.	Promosi Komoditas Unggulan oleh SKP/Klaster	SKP belum mempromosikan komoditas unggulan SKP sudah mempromosikan komoditas unggulan dalam skala lokal (kabupaten/kota dan provinsi) SKP sudah mempromosikan komoditas unggulan dalam skala nasional SKP sudah mempromosikan komoditas unggulan dalam skala internasional
6.	Tingkat Melek Keuangan Masyarakat	Sebagian besar (lebih dari 50%) masyarakat belum memanfaatkan jasa keuangan Sebagian besar (lebih dari 50%) sudah memanfaatkan jasa perbankan namun belum memanfaatkan jasa kredit untuk usaha Sebagian besar (lebih dari 50%) sudah memanfaatkan jasa perbankan dan sudah memanfaatkan jasa kredit untuk usaha
7.	Kepemilikan dan/atau Penguasaan Lahan	Hampir 50% lebih lahan di SKP dikuasai oleh penduduk dari luar kawasan Sekitar 25% - 50% lebih lahan di SKP dikuasai oleh penduduk dari luar kawasan Kurang dari 25% lahan di SKP dikuasai oleh penduduk dari luar kawasan
<b>B. DIMENSI SOSIAL BUDAYA</b>		
1.	Kreativitas Masyarakat	Masyarakat masih belum ada kreativitas mengembangkan komoditas unggulan Kurang dari 50% masyarakat sudah mempunyai kreativitas mengembangkan komoditas unggulan

No.	Peubah	Indikator
		Lebih dari 50% masyarakat sudah mempunyai kreativitas mengembangkan komoditas unggulan
2.	Pelibatan Pelaku Seni dan Budaya	<p>Pelaku seni dan budaya tidak dilibatkan dalam pengembangan komoditas unggulan dan SKP</p> <p>Pelaku seni dan budaya sudah dilibatkan dalam pengembangan komoditas unggulan dan SKP namun belum efektif</p> <p>Pelaku seni dan budaya sudah dilibatkan dalam pengembangan komoditas unggulan dan SKP dan sudah efektif/optimal</p>
3.	Pemanfaatan Produk Budaya Masyarakat	<p>Produk budaya masyarakat lokal belum dimanfaatkan dalam rangka pengembangan komoditas unggulan</p> <p>Produk budaya masyarakat lokal sudah dimanfaatkan secara komersial dalam rangka pengembangan komoditas unggulan namun belum optimal</p> <p>Produk budaya masyarakat lokal sudah dimanfaatkan secara industrialisasi dalam rangka pengembangan komoditas unggulan secara optimal</p>
4.	Migrasi Penduduk Keluar Kawasan	<p>Lebih dari 25% dari SKP bermigrasi ke luar kabupaten untuk mencari nafkah</p> <p>Sekitar 10% - 25% dari SKP bermigrasi ke luar kabupaten untuk mencari nafkah</p> <p>Kurang dari 10% dari SKP bermigrasi ke luar kabupaten untuk mencari nafkah</p>
5.	Governansi Budaya	<p>Keterlibatan warga dalam pengelolaan institusi budaya, program dan acara, baik secara langsung maupun melalui organisasi masyarakat madani, bukanlah salah satu prioritas atau sasaran kebijakan budaya lokal</p> <p>Keterlibatan warga dalam pengelolaan institusi budaya, program dan acara, baik secara langsung maupun melalui organisasi masyarakat madani, baru sebagian menjadi salah satu prioritas atau sasaran kebijakan budaya lokal</p> <p>Keterlibatan warga dalam pengelolaan institusi budaya, program dan acara, baik secara langsung maupun melalui organisasi masyarakat madani, sudah menjadi salah satu prioritas atau sasaran kebijakan budaya lokal</p>

No.	Peubah	Indikator
6.	Budaya dan Pendidikan	<p>Budaya lokal tidak diajarkan baik dalam sekolah formal maupun informal di SKP tersebut</p> <p>Budaya lokal diajarkan baik dalam sekolah formal maupun informal di SKP tersebut</p> <p>Pendidikan informal dan formal, asosiasi dan dunia usaha bersama-sama melakukan pelestarian dan penciptaan budaya lokal, dan menampilkannya dalam kalender budaya SKP tersebut</p>
7.	Budaya, Informasi dan Pengetahuan	<p>Tidak ada kebijakan atau program dari pemerintah dan dunia usaha/masyarakat untuk melibatkan masyarakat dalam menciptakan, memproduksi dan mendistribusikan secara digital</p> <p>Terdapat kebijakan atau program dari pemerintah dan swasta/masyarakat untuk melibatkan masyarakat dalam menciptakan, memproduksi dan mendistribusikan secara digital namun belum efektif</p> <p>Terdapat kebijakan atau program dari pemerintah dan swasta/masyarakat untuk melibatkan masyarakat dalam menciptakan, memproduksi dan mendistribusikan secara digital dan sudah efektif</p>
8.	Budaya dan Perencanaan	<p>Perencanaan SKP ataupun master plan pembangunan SKP belum secara eksplisit merujuk kepada sumber-sumber dan permasalahan budaya</p> <p>Perencanaan SKP ataupun master plan pembangunan SKP sudah secara eksplisit merujuk kepada sumber-sumber dan permasalahan budaya walaupun baru sebagian</p> <p>Perencanaan SKP ataupun master plan pembangunan SKP sudah secara keseluruhan dan eksplisit telah merujuk kepada sumber-sumber dan permasalahan budaya</p>
9.	Budaya, Kesetaraan dan Inklusi Sosial	<p>Fasilitas budaya dan ruang publik tidak didesain dengan mempertimbangkan eksistensi, aktualitas, aksesibilitas untuk seluruh lapisan masyarakat (misalnya untuk difable)</p> <p>Fasilitas budaya dan ruang publik baru sebagaimana didesain dengan mempertimbangkan eksistensi, aktualitas, aksesibilitas untuk seluruh lapisan masyarakat</p>

No.	Peubah	Indikator
		Fasilitas budaya dan ruang publik seluruhnya sudah didesain dengan mempertimbangkan eksistensi, aktualitas, aksesibilitas untuk seluruh lapisan masyarakat
10.	Kerekatan Sosial	<p>Masyarakat di SKP satu sama lain belum merasa menjadi masyarakat yang satu di kawasan tersebut dan apabila terjadi konflik maka tidak ada mekanisme resolusi konflik yang baik</p> <p>Masyarakat di SKP satu sama lain belum seluruhnya merasa menjadi masyarakat yang satu di kawasan tersebut dan apabila terjadi konflik maka baru ada sedikit mekanisme resolusi konflik yang baik</p> <p>Masyarakat di SKP satu sama lain sudah seluruhnya merasa menjadi masyarakat yang satu di kawasan tersebut dan apabila terjadi konflik maka sudah ada mekanisme resolusi konflik yang baik</p>
<b>C. DIMENSI LINGKUNGAN</b>		
1.	Pembangunan Kawasan Transmigrasi mengacu pada Tata Ruang SKP	<p>Belum ada penetapan rencana rinci tata ruang SKP</p> <p>Ada dokumen penetapan rencana rinci tata ruang tata ruang SKP</p> <p>Ada dokumen penetapan rencana rinci tata ruang tata ruang SKP dan dijadikan acuan dalam perencanaan, pengawasan dan pengendalian Pembangunan SKP</p>
2.	Ruang Terbuka Hijau (RTH) SKP	<p>RTH kurang dari 10%</p> <p>RTH antara 10% - 20%</p> <p>RTH antara 20% - 30%</p> <p>RTH lebih dari 30%</p>
3.	Pemanfaatan <i>Amenity Resources</i> untuk Kegiatan Ekonomi dan Sosial SKP	<p>Belum ada pemanfaatan <i>amenity resources</i> untuk kegiatan ekonomi dan sosial</p> <p>Sudah ada pemanfaatan <i>amenity resources</i> untuk kegiatan ekonomi dan sosial tapi belum optimal</p> <p>Sudah ada pemanfaatan <i>amenity resources</i> untuk kegiatan ekonomi dan sosial sudah optimal</p>

No.	Peubah	Indikator
4.	Kesadaran Masyarakat SKP terhadap permasalahan dan pemanfaatan lingkungan	Masyarakat belum memiliki kesadaran dan pemahaman tentang permasalahan dan pemanfaatan lingkungan Masyarakat sudah memiliki kesadaran dan pemahaman tentang permasalahan dan pemanfaatan lingkungan Masyarakat sudah memiliki kesadaran dan pemahaman tentang permasalahan dan pemanfaatan lingkungan serta mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari Masyarakat sudah memiliki kesadaran dan pemahaman tentang permasalahan dan pemanfaatan lingkungan serta menuangkan ke dalam aturan (tidak tertulis dan/atau tertulis) dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari
5.	Adaptasi terhadap perubahan iklim masyarakat di SKP	Kegiatan ekonomi utama meningkatkan kerentanan terhadap resiko terhadap perubahan iklim Kegiatan ekonomi utama sudah adaptif terhadap perubahan iklim namun belum optimal Kegiatan ekonomi utama sudah adaptif terhadap perubahan iklim
6.	Kapasitas Mitigasi Bencana	Ada resiko bencana tapi belum ada upaya mitigasi Ada resiko bencana dan sudah ada rencana untuk mitigasi Ada resiko bencana, dan mitigasi yang terstruktur dalam kebijakan program dan anggaran
7.	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah di SKP	Tidak ada TPS dan tidak ada sistem pengelolaan sampah Ada TPS tapi masyarakat tidak membuang sampah di TPS Ada TPS dan ada sistem penanganan sampah Ada TPS, sistem penanganan dan pengelolaan sampah
8.	Pengelolaan dan Pemanfaatan Limbah di SKP	Limbah dari kegiatan ekonomi utama dibiarkan tanpa pengelolaan Limbah dari kegiatan ekonomi utama sudah dikelola tapi belum optimal Limbah dari kegiatan ekonomi utama sudah dikelola dan dimanfaatkan

No.	Peubah	Indikator
<b>D. DIMENSI JEJARING PRASARANA DAN SARANA</b>		
1.	Konektivitas antar SP dalam SKP dan antar SKP/PPLT yang berdekatan	Antar SP di dalam SKP belum seluruhnya terhubung dengan prasarana jalan Antar SP di dalam SKP seluruhnya sudah terhubung dengan prasarana jalan, namun kondisi jalan lebih dari 50% masih buruk (tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda 4/lebih) Antar SP di dalam SKP seluruhnya sudah terhubung dengan prasarana jalan, dan lebih dari 50% kondisi jalan dalam keadaan baik (bisa dilalui oleh kendaraan roda 4/lebih kecuali cuaca tertentu) Antara Pusat SKP/PPLT dengan Pusat SKP/PPLT yang berdekatan sudah terhubung dengan prasarana jalan, dan lebih dari 50% kondisi jalan dalam keadaan baik (bisa dilalui oleh kendaraan roda 4/lebih dalam segala cuaca)
2.	Angkutan Umum	Tidak ada angkutan umum yang melalui kawasan transmigrasi Ada angkutan umum dengan trayek tidak tetap Ada angkutan umum ada trayek tetap tapi tidak setiap hari Ada angkutan umum trayek tetap dan setiap hari
3.	Sumber Air Minum dan Mandi/Cuci Masyarakat di Kawasan Transmigrasi	Air hujan Sungai/danau/kolam Mata Air Sumur Sumur Bor/pompa PAM/Ledeng/air kemasan
4.	Keberadaan Sekolah Lanjutan Pertama (SLP) sederajat	Tidak ada Ada di SKP lain Ada dan lokasinya di SKP yang bersangkutan
5.	Keberadaan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)	Tidak ada Ada di SKP lain Ada dan lokasinya di SKP yang bersangkutan

No.	Peubah	Indikator
6.	Sarana Rekreasi dan Pengembangan kebudayaan	Tidak ada
		Ada di SKP lain
		Ada dan lokasinya di SKP yang bersangkutan
7.	Ketersediaan Bahan Bakar	Tidak ada SPBU dan atau penyedia BBG
		Ada SPBU dan atau penyedia BBG namun tidak tersedia sepanjang waktu
		Ada SPBU dan atau penyedia BBG namun tidak tersedia sepanjang waktu
8.	Elektrifikasi SKP	SP-SP dalam SKP belum ada listrik
		Belum seluruh SP terjangkau dengan listrik
		Seluruh SP sudah terjangkau listrik namun kurang dari 50% warganya menggunakan listrik
		Seluruh SP sudah terjangkau listrik dan lebih dari 50% warganya menggunakan listrik
9.	Pemanfaatan alat komunikasi dan Internet	Sebagian besar masyarakat belum dapat mengakses alat komunikasi dan internet
		Sebagian besar masyarakat sudah dapat mengakses internet namun belum dimanfaatkan untuk pengembangan Komoditas unggulan, misalnya untuk promosi komoditas unggulan
		Sebagian besar masyarakat sudah dapat mengakses internet dan sudah dimanfaatkan untuk pengembangan Komoditas unggulan, misalnya untuk promosi komoditas unggulan
10.	Ketersediaan Kantor Pelayanan Pemerintahan	Belum tersedia
		Sudah tersedia tetapi letaknya SKP lain
		Sudah tersedia dan terletak di SKP yang bersangkutan
<b>E. DIMENSI KELEMBAGAAN</b>		
1.	Pasar Harian	Tidak ada pasar (aktivitas dan bangunannya)
		Ada aktivitas pasar secara berkala (mingguan) dan tidak ada bangunan pasar

No.	Peubah	Indikator
		Ada aktivitas pasar harian dan ada bangunan pasar walaupun tidak permanen
2.	Keberadaan Gabungan Kelompok Tani/Nelayan/Peternak/Pekebun	Ada aktivitas pasar secara rutin (harian) dan ada bangunan pasar permanen Belum terbentuk Gapoktan Sudah terbentuk gapoktan namun masih bergerak di bidang produksi Sudah terbentuk gapoktan dan bidang usahanya sudah berkembang mengarah kepada fungsi usaha pertanian dari hulu ke hilir Disamping pengembangan usaha pertanian dari hulu ke hilir, sudah terlibat juga lembaga non keuangan pendukung usaha pertanian (klinik agribisnis, lembaga penyuluh pertanian, lembaga UPJA/Usaha Penyedia Jasa Alsintan, dll)
3.	Keberadaan BUM Desa bersama	Belum ada BUM Desa bersama Sudah ada BUM Desa bersama, sudah ada usahanya tetapi tidak berkaitan dengan pengembangan komoditas unggulan Sudah ada BUM Desa bersama, sudah ada usahanya tetapi belum aktif berperan dalam pengembangan komoditas unggulan Sudah ada BUM Desa bersama, sudah ada usahanya dan aktif berperan dalam pengembangan komoditas unggulan
4.	Keberadaan Lembaga Perbankan dan Lembaga Keuangan Mikro	Tidak ada LKM Ada LKM namun wilayah kerjanya hanya mencakup SP/Desa saja Ada LKM, dan wilayah kerjanya mencakup beberapa SP/Desa
5.	Lembaga Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Tidak ada Ada di wilayah SKP lain Ada di Wilayah SKP
6.	Lembaga Penanggung jawab Pelaksanaan Pengembangan SKP	Belum ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah sudah menetapkan lembaga penanggungjawab pelaksanaan pengembangan SKP namun belum bekerja secara efektif Pemerintah Daerah sudah menetapkan lembaga penanggungjawab pelaksanaan pengembangan SKP dan sudah efektif melaksanakan tugas

Tabel 2.2. Tata Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam rangka pengukuran indeks perkembangan SKP dilakukan secara luring dan daring.

2.2.1. Pengumpulan Data Secara Luring dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. fasilitator melakukan survei lapangan keseluruhan SKP sebelum dilaksanakannya FGD dengan melakukan peninjauan/pengamatan lapangan dan wawancara secara mendalam dengan beberapa responden kunci; dan
- b. mekanisme FGD dengan Peserta dan pelaksanaan FGD sebagai berikut:

Peserta	Pelaksanaan FGD
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kadis Tenaga Kerja dan Transmigrasi;</li> <li>2. Camat setempat;</li> <li>3. Polsek setempat;</li> <li>4. Ketua BUM Desa bersama/Ketua BUM Desa;</li> <li>5. Ketua Gapoktan/Tani Andalan;</li> <li>6. Ketua Pokdarwis;</li> <li>7. Ketua Pokdakan/Poklahsar;</li> <li>8. Para Kepala Desa yang berada dalam wilayah deliniasi SKP;</li> <li>9. Penyuluh Pertanian;</li> <li>10. Petugas BPS di kecamatan yang bersangkutan;</li> <li>11. Dokter Puskesmas;</li> <li>12. Himpunan Kerukunan Tani Indonesia dan atau Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia;</li> <li>13. Organisasi Masyarakat Madani Pemerhati Transmigrasi (LSM, Ormas, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dlsb); dan</li> <li>14. Stakeholders lainnya sesuai kebutuhan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitator menjelaskan tentang pertanyaan-pertanyaan dari indikator yang telah disusun;</li> <li>2. Fasilitator mempersilahkan kepada peserta untuk menanyakan hal-hal yang kurang jelas;</li> <li>3. Setelah tanya jawab sekitar 30 menit, kemudian fasilitator mempersilahkan para peserta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah disediakan;</li> <li>4. Peserta boleh mendiskusikan dengan para peserta lainnya yang berada dalam satu meja;</li> <li>5. Jawaban dari peserta, dapat berupa jawaban dari masing-masing peserta ataupun merupakan jawaban dari satu meja;</li> <li>6. Pendamping bertugas mencatat semua proses diskusi yang terjadi pada setiap meja;</li> <li>7. Setelah peserta melakukan pengisian kuesioner, tahapan selanjutnya adalah melakukan rekapitulasi jawaban responden yang diinput ke dalam Microsoft Excel. Jawaban responden diinput berdasarkan Dimensi Ekonomi, Dimensi Sosial Budaya, Dimensi Lingkungan, Dimensi Prasarana dan Sarana, dan Dimensi Kelembagaan sesuai dengan form isian yang tersedia.</li> </ol>

2.2.2. Pengumpulan Data Secara Daring dilakukan dengan menggunakan kuesioner berdasarkan dimensi, peubah, dan indikator sebagaimana terlampir.

Tabel 2.3. Tata Cara Pengolahan dan Analisis Data

No	Uraian
1.	Pengolahan Data a. Data dari kuesioner dan hasil pengamatan dituangkan ke dalam tabel data b. Nilai gabungan dari masing masing indikator digunakan dengan cara penghitungan modus c. Justifikasi atau verifikasi dapat dilakukan oleh fasilitator terhadap beberapa indikator-indikator sesuai dengan hasil wawancara dan hasil pengamatan lapangan
2.	Analisis data a. Analisis data menggunakan software PRAPSKP yang berbasis multi dimensional scaling (MDS) b. Analisis data berupa status perkembangan dimensi analisis atribut pengungkit ( <i>leverage attributes</i> ) dan ( <i>analisis montercarlo</i> ) c. Penentuan bobot masing masing dimensi

Tabel 2.4. Tata Cara Penentuan Status SKP

No	Uraian
1.	Perhitungan Indeks SKP $IPSKP = \sum W_i \times D_i$ Dimana: IPSKP= Indeks Perkembangan Satuan Kawasan Pengembangan $W_i$ = Bobot masing masing dimensi $D_i$ = Nilai masing masing dimensi
2.	Penentuan Status SKP a. Nilai IPSKP < 50 statusnya Kurang Berkembang; b. Nilai IPSKP $50 \leq$ IPSKP < 75 statusnya Cukup Berkembang; c. Nilai IPSKP $\geq$ 75 statusnya Berkembang

Tabel 2.5. Rekomendasi Indikasi Kegiatan Pengembangan SKP

No	Uraian
1.	Rekomendasi Indikasi Kegiatan disusun berdasarkan atribut pengungkit dari dimensi ekonomi, Sosial Budaya, Lingkungan, Jejaring Prasarana dan Sarana, dan Kelembagaan.
2.	Rekomendasi berupa Indikasi Kegiatan untuk masing masing dimensi dari hasil penilaian lapangan yang memuat acuan rencana kegiatan dalam jangka waktu tertentu

III. INDEKS PENILAIAN KAWASAN PERKOTAAN BARU

Tabel 3.1. Dimensi, Peubah, dan Indikator

No.	Peubah	Indikator
<b>A. DIMENSI EKONOMI</b>		
1.	Pengembangan Komoditas Unggulan	<p>Komoditas unggulan belum dikembangkan</p> <p>Komoditas unggulan sudah dikembangkan namun tidak terkait dengan pengembangan komoditas di Kawasan Transmigrasi</p> <p>Komoditas unggulan sudah dikembangkan sudah terkait dengan Kawasan transmigrasi dalam rantai nilai vertikal dari dari produksi, pengolahan, dan pemasaran</p> <p>Komoditas unggulan sudah dikembangkan sudah terkait dengan Kawasan Transmigrasi dalam rantai nilai vertikal dari produksi, pengolahan, dan pemasaran dan berkaitan dengan vertikal lain</p>
2.	Pelibatan Masyarakat dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam Pengembangan Komoditas Unggulan	<p>Hanya sebagian kecil masyarakat (kurang dari 25%), koperasi dan UMKM yang terlibat dalam pengembangan komoditas unggulan secara terorganisir oleh klaster</p> <p>Sekitar 25% - 50% masyarakat, koperasi dan UMKM dilibatkan dalam pengembangan komoditas unggulan secara terorganisir oleh klaster</p> <p>Lebih dari 50% masyarakat, koperasi dan UMKM dilibatkan dalam pengembangan komoditas unggulan secara terorganisir oleh klaster</p>
3.	Pengembangan Jejaring antara KPB dengan Pusat Kegiatan dan Kawasan lainnya	<p>Tidak ada keterkaitan antara KPB dengan pusat kegiatan/Kawasan lainnya dalam rangka pengembangan komoditas unggulan</p> <p>Ada keterkaitan antara KPB dengan dengan pusat kegiatan/Kawasan lainnya dalam rangka pengembangan komoditas unggulan walaupun belum berkembang dengan baik</p> <p>Ada keterkaitan antara KPB dengan pusat kegiatan/Kawasan lainnya dalam rangka pengembangan komoditas unggulan dan sudah berkembang dengan baik</p>

No.	Peubah	Indikator
4.	Promosi Investasi KPB	Potensi investasi di KPB belum di promosikan Potensi investasi di KPB sudah di promosikan dalam skala lokal (kabupaten/kota dan provinsi) Potensi investasi di KPB sudah di promosikan dalam skala nasional Potensi investasi di KPB sudah di promosikan dalam skala internasional
5.	Promosi Produk Unggulan yang diproduksi KPB	Produk unggulan yang diproduksi di KPB dan Kawasan transmigrasi belum di promosikan Produk unggulan yang diproduksi di KPB dan Kawasan transmigrasi sudah di promosikan dalam skala lokal (kabupaten/kota dan provinsi) Produk unggulan yang diproduksi di KPB dan Kawasan transmigrasi sudah di promosikan dalam skala nasional Produk unggulan yang diproduksi di KPB dan Kawasan transmigrasi sudah di promosikan dalam skala internasional
6.	Sertifikasi/Standarisasi Produk yang dihasilkan	Produk yang dihasilkan belum mempunyai standard/sertifikasi baik nasional maupun internasional Produk yang dihasilkan sudah memiliki sertifikasi/standarisasi aras nasional Produk yang dihasilkan sudah memiliki sertifikasi/standarisasi aras internasional
7.	Tingkat Melek Keuangan Masyarakat	Sebagian besar (lebih dari 50%) masyarakat belum memanfaatkan jasa keuangan Sebagian besar (lebih dari 50%) sudah memanfaatkan jasa perbankan namun belum memanfaatkan jasa kredit untuk usaha Sebagian besar (lebih dari 50%) sudah memanfaatkan jasa perbankan dan sudah memanfaatkan jasa kredit untuk usaha
8.	Perkembangan Ekonomi KPB	Tidak ada industri pengolahan dan pasar/pusat perdagangan/jasa perbankan Sudah ada industri pengolahan dan atau pasar/pusat perdagangan/jasa perbankan

No.	Peubah	Indikator
		Sudah ada industri pengolahan dan pasar/pusat perdagangan/jasa perbankan
<b>B. DIMENSI SOSIAL BUDAYA</b>		
1.	Kreativitas Masyarakat	Masyarakat masih belum ada kreativitas mengembangkan komoditas unggulan Kurang dari 50% masyarakat sudah mempunyai kreativitas mengembangkan komoditas unggulan Lebih dari 50% masyarakat sudah mempunyai kreativitas mengembangkan komoditas unggulan
2.	Pelibatan Pelaku Seni dan Budaya	Pelaku seni dan budaya tidak dilibatkan dalam pengembangan komoditas unggulan dan KPB Pelaku seni dan budaya sudah dilibatkan dalam pengembangan komoditas unggulan dan KPB namun belum efektif Pelaku seni dan budaya sudah dilibatkan dalam pengembangan komoditas unggulan dan KPB dan sudah efektif/optimal
3.	Pemanfaatan Produk Budaya Masyarakat	Produk budaya masyarakat lokal belum dimanfaatkan dalam rangka pengembangan komoditas unggulan Produk budaya masyarakat lokal sudah dimanfaatkan secara komersial dalam rangka pengembangan komoditas unggulan namun belum optimal Produk budaya masyarakat lokal sudah dimanfaatkan secara industrialisasi dalam rangka pengembangan komoditas unggulan secara optimal
4.	Budaya dan Perencanaan	Perencanaan KPB ataupun master plan pembangunan kawasan belum secara eksplisit merujuk kepada sumber-sumber dan permasalahan budaya Perencanaan KPB ataupun master plan pembangunan kawasan sudah secara eksplisit merujuk kepada sumber-sumber dan permasalahan budaya walaupun baru sebagian

No.	Peubah	Indikator
		Perencanaan KPB ataupun master plan pembangunan kawasan sudah secara keseluruhan dan eksplisit telah merujuk kepada sumber-sumber dan permasalahan budaya
5.	Budaya, Kesetaraan dan Inklusi Sosial	<p>Belum ada fasilitas budaya</p> <p>Fasilitas budaya dan ruang publik tidak didesain dengan mempertimbangkan eksistensi, aktualitas, aksesibilitas untuk seluruh lapisan masyarakat (misalnya untuk difable)</p> <p>Fasilitas budaya dan ruang publik baru sebagian didesain dengan mempertimbangkan eksistensi, aktualitas, aksesibilitas untuk seluruh lapisan masyarakat</p> <p>Fasilitas budaya dan ruang publik seluruhnya sudah didesain dengan mempertimbangkan eksistensi, aktualitas, aksesibilitas untuk seluruh lapisan masyarakat</p>
6.	Kerekatan Sosial	<p>Masyarakat di KPB satu sama lain belum merasa menjadi masyarakat yang satu di kawasan tersebut dan apabila terjadi konflik maka tidak ada mekanisme resolusi konflik yang baik</p> <p>Masyarakat di KPB satu sama lain belum seluruhnya merasa menjadi masyarakat yang satu di kawasan tersebut dan apabila terjadi konflik maka baru ada sedikit mekanisme resolusi konflik yang baik</p> <p>Masyarakat di KPB satu sama lain sudah seluruhnya merasa menjadi masyarakat yang satu di kawasan tersebut dan apabila terjadi konflik maka sudah ada mekanisme resolusi konflik yang baik</p>
<b>C. DIMENSI LINGKUNGAN</b>		
1.	Penyediaan Zonasi di KPB	<p>Belum ada zonasi KPB</p> <p>Ada dokumen penetapan zonasi KPB tapi belum dijadikan acuan dalam perencanaan, pengawasan, dan pengendalian pembangunan KPB</p> <p>Ada dokumen penetapan zonasi KPB dan sudah dijadikan acuan dalam perencanaan, pengawasan, dan pengendalian Pembangunan KPB</p>
2.	Ruang Terbuka Hijau	<p>RTH kurang dari 10%</p> <p>RTH antara 10% - 20%</p>

No.	Peubah	Indikator
		RTH Antara 20% - 30%
		RTH lebih dari 30%
3.	Penyediaan Ruang Publik	Belum ada ruang publik untuk taman, olah raga, dan atau untuk kegiatan social lainnya
		sudah ada salah satu ruang publik (taman atau tempat olah raga, atau kegiatan social lainnya)
		sudah ada lebih dari satu ruang publik (taman atau tempat olah raga, atau kegiatan social lainnya)
4.	Kesadaran Masyarakat Terhadap Permasalahan dan Pemanfaatan Lingkungan	Masyarakat belum memiliki kesadaran dan pemahaman tentang permasalahan dan pemanfaatan lingkungan
		Masyarakat sudah memiliki kesadaran dan pemahaman tentang permasalahan dan pemanfaatan lingkungan
		Masyarakat sudah memiliki kesadaran dan pemahaman tentang permasalahan dan pemanfaatan lingkungan serta mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari
		Masyarakat sudah memiliki kesadaran dan pemahaman tentang permasalahan dan pemanfaatan lingkungan serta menuangkan ke dalam aturan (tidak tertulis dan/atau tertulis) dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari
5.	Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim	Kegiatan ekonomi utama meningkatkan kerentanan terhadap resiko terhadap perubahan iklim
		Kegiatan ekonomi utama sudah adaptif terhadap perubahan iklim namun belum optimal
		Kegiatan ekonomi utama sudah adaptif terhadap perubahan iklim
6.	Kapasitas Mitigasi Bencana	Ada resiko bencana tapi belum ada upaya mitigasi
		Ada resiko bencana dan sudah ada rencana untuk mitigasi
		Ada resiko bencana, dan mitigasi yang terstruktur dalam kebijakan program dan anggaran
7.	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah	Tidak ada TPS dan tidak ada sistem pengelolaan sampah
		Ada TPS tapi masyarakat tidak membuang sampah di TPS

No.	Peubah	Indikator
		Ada TPS dan ada sistem penanganan sampah
		Ada TPS, sistem penanganan dan pengelolaan sampah
8.	Pengelolaan dan Pemanfaatan Limbah	Limbah dari kegiatan ekonomi utama dibiarkan tanpa pengelolaan
		Limbah dari kegiatan ekonomi utama sudah dikelola tapi belum optimal
		Limbah dari kegiatan ekonomi utama sudah dikelola dan dimanfaatkan
9.	Sistem Drainase Perkotaan	Tidak ada sistem drainase perkotaan
		Ada sistem drainase perkotaan di seluruh KPB tapi tidak berfungsi dengan baik
		Ada sistem drainase perkotaan di seluruh KPB dan sudah berfungsi dengan baik
<b>D. DIMENSI JEJARING PRASARANA DAN SARANA</b>		
1.	Konektivitas antara KPB, Pusat Kegiatan dan Kawasan lain	KPB belum terhubung dengan pusat kegiatan dan kawasan terdekat
		KPB sudah terhubung dengan pusat kegiatan dan kawasan terdekat namun kondisi jalan lebih dari 50% masih buruk (tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda 4/lebih
		KPB sudah terhubung dengan pusat kegiatan dan kawasan terdekat dan lebih dari 50% kondisi jalan dalam keadaan baik (bisa dilalui oleh kendaraan roda 4/lebih kecuali cuaca tertentu)
		KPB sudah terhubung dengan pusat kegiatan dan kawasan terdekat dan lebih dari 50% kondisi jalan dalam keadaan baik (bisa dilalui oleh kendaraan roda 4/lebih dalam segala cuaca)
2.	Konektivitas antara KPB dan Hinterland dalam Kawasan Transmigrasi	Antara KPB dengan PPLT/Pusat SKP dalam Kawasan Transmigrasi belum seluruhnya terhubung dengan prasarana jalan
		Antara KPB dengan seluruh PPLT/Pusat SKP dalam Kawasan Transmigrasi sudah terhubung dengan prasarana jalan namun kondisi jalan lebih dari 50% masih buruk (tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda 4/lebih

No.	Peubah	Indikator
		<p>Antara KPB dengan Seluruh PPLT/Pusat SKP dalam Kawasan Transmigrasi sudah terhubung dengan prasarana jalan dan lebih dari 50% kondisi jalan dalam keadaan baik (bisa dilalui oleh kendaraan roda 4/lebih kecuali cuaca tertentu)</p> <p>Antara KPB dengan Seluruh PPLT/Pusat SKP dalam Kawasan Transmigrasi sudah terhubung prasarana jalan dan sudah terhubung dengan PPKT/KPB dan lebih dari 50% kondisi jalan dalam keadaan baik (bisa dilalui oleh kendaraan roda 4/lebih dalam segala cuaca)</p>
3.	Sekolah Menengah Kejuruan	<p>Tidak ada SMK di sekitar lokasi KPB yang ditetapkan</p> <p>Ada SMK di sekitar lokasi KPB yang ditetapkan namun tidak ada program studi yang berkaitan dengan komoditas unggulan</p> <p>Ada SMK di sekitar lokasi KPB yang ditetapkan dan ada program studi yang berkaitan dengan komoditas unggulan namun lulusannya sebagian besar tidak bekerja di kawasan</p> <p>Ada SMK di sekitar lokasi KPB yang ditetapkan dan ada program studi yang berkaitan dengan komoditas unggulan dan lulusannya sebagian besar bekerja di kawasan</p>
4.	Pelayanan Pendidikan Vokasi dan Keterampilan	<p>Tidak ada pelayanan pendidikan yang melatih masyarakat di KPB yang ditetapkan</p> <p>Ada pelayanan pendidikan yang melatih masyarakat di KPB yang ditetapkan namun belum berkaitan dengan komoditas unggulan</p> <p>Ada pelayanan pendidikan yang melatih masyarakat di KPB yang ditetapkan dan berkaitan dengan komoditas unggulan</p>
5.	Aksesibilitas ke dan dari KPB serta ke Sentra Komoditas Unggulan	<p>Alat transportasi tidak dapat mengakses dari dan ke KPB</p> <p>Alat transportasi dapat mengakses dari dan ke KPB</p> <p>Alat transportasi dapat mengakses dari dan ke KPB dan ke sentra komoditas unggulan dan/atau non unggulan</p>
6.	Angkutan Umum	<p>Tidak ada angkutan umum yang melalui KPB</p> <p>Ada angkutan umum dengan trayek tidak tetap</p>

No.	Peubah	Indikator
		Ada angkutan umum ada trayek tetap tapi tidak setiap hari
		Ada angkutan umum trayek tetap dan setiap hari
7.	Elektrifikasi KPB	Kurang dari 25% rumah tangga di KPB sudah dialiri listrik
		26% - 50% rumah tangga di KPB sudah dialiri listrik
		51% - 75% rumah tangga di KPB sudah dialiri listrik
		>75% rumah tangga di KPB sudah dialiri listrik
8.	Pemanfaatan Alat Komunikasi dan Internet	Sebagian besar masyarakat belum dapat mengakses alat komunikasi dan internet
		Sebagian besar masyarakat sudah dapat mengakses internet namun belum dimanfaatkan untuk pengembangan Komoditas unggulan, misalnya untuk promosi komoditas unggulan
		Sebagian besar masyarakat sudah dapat mengakses internet dan sudah dimanfaatkan untuk pengembangan Komoditas unggulan, misalnya untuk promosi komoditas unggulan
9.	Sumber Air Minum dan Mandi/Cuci Masyarakat di KPB	Air hujan
		Sungai/danau/kolam
		Mata Air
		Sumur
		Sumur Bor/pompa
		PAM/Ledeng/air kemasan
10.	Ketersediaan Bahan Bakar	Tidak ada SPBU dan atau penyedia BBG
		Ada SPBU dan atau penyedia BBG namun tidak tersedia sepanjang waktu
		Ada SPBU dan atau penyedia BBG namun tidak tersedia sepanjang waktu
11.	Rumah Ibadah/Islamic Center	Belum ada rumah ibadah/Islamic center
		Sudah ada rumah ibadah/Islamic center namun belum berfungsi optimal dalam meningkatkan kapasitas keagamaan
		Sudah ada rumah ibadah/Islamic center dan sudah berfungsi optimal dalam meningkatkan kapasitas keagamaan

No.	Peubah	Indikator
12.	Puskesmas Rawat Inap	Tidak ada puskesmas rawat inap Ada puskesmas rawat inap namun baru dapat melayani kurang dari 25% Kawasan transmigrasi Ada puskesmas rawat inap namun baru dapat melayani kurang dari 25% - 50% Kawasan transmigrasi Ada puskesmas rawat inap namun baru dapat melayani kurang dari 50% Kawasan transmigrasi
E. DIMENSI KELEMBAGAAN		
1.	Insentif/Kebijakan Daerah tentang Investasi di KPB	Tidak ada kebijakan pemberian insentif Ada kebijakan pemberian insentif tapi belum efektif Ada kebijakan pemberian insentif dan sudah efektif
2.	Kebijakan Daerah dalam Pengembangan KPB yang telah ditetapkan	Tidak ada kebijakan daerah baik dalam RTRWK dan atau RPJMD tentang pengembangan KPB yang telah ditetapkan Sudah ada kebijakan daerah baik dalam RTRWK dan atau RPJMD tapi belum dijadikan acuan dalam pembangunan KPB Sudah ada kebijakan daerah baik dalam RTRWK dan atau RPJMD dan sudah dijadikan acuan dalam pembangunan KPB
3.	Komitmen Pemerintah Untuk Pembiayaan KPB yang telah ditetapkan	Tidak ada komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam mendanai pembangunan KPB yang telah ditetapkan Ada komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam mendanai pembangunan KPB yang telah ditetapkan namun masih belum signifikan (relative kecil yaitu kurang dari 50% dari rencana anggaran biaya yang ditetapkan) Ada komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam mendanai pembangunan KPB yang telah ditetapkan namun masih terlalu signifikan (antara 50% - 75 % dari rencana anggaran biaya yang ditetapkan) Ada komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam mendanai pembangunan KPB yang telah ditetapkan yang sudah signifikan (lebih dari 75% dari rencana anggaran biaya yang ditetapkan)

No.	Peubah	Indikator
4.	Pengembangan Kerja Sama antara Pemerintah, Dunia Usaha, Perguruan Tinggi/Lembaga Penelitian dan Pemangku Kepentingan Lainnya dalam Mengembangkan Inovasi untuk Pengembangan KPB;	<p>Tidak ada kerjasama antara pemerintah daerah, dunia usaha dengan PT/LP setempat untuk mendorong inovasi pengembangan komoditas unggulan di KPB</p> <p>Sudah ada kerjasama antara pemerintah daerah, dunia usaha dengan PT/LP setempat namun belum mendorong inovasi pengembangan Komoditas Unggulan di KPB</p> <p>Sudah ada kerjasama antara pemerintah daerah, dunia usaha dengan PT/LP setempat dan sudah menghasilkan inovasi pengembangan Komoditas Unggulan di KPB</p>
5.	Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah Tentang Promosi KPB dan Produk Unggulannya;	<p>Tidak ada kebijakan pemerintah pusat dan daerah tentang promosi KPB dan produk unggulannya</p> <p>Sudah ada kebijakan pemerintah pusat dan daerah tentang promosi KPB dan produk unggulannya namun baru skala lokal</p> <p>Sudah ada kebijakan pemerintah pusat dan daerah tentang promosi KPB dan produk unggulannya namun baru skala nasional</p> <p>Sudah ada kebijakan pemerintah pusat dan daerah tentang promosi KPB dan produk unggulannya dengan skala internasional</p>

Tabel 3.2. Tata Cara pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam rangka pengukuran indeks perkembangan KPB dilakukan secara luring dan daring.

3.2.1. Pengumpulan Data Secara Luring dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. fasilitator melakukan survei lapangan keseluruhan KPB sebelum dilaksanakannya FGD dengan melakukan peninjauan/pengamatan lapangan dan wawancara secara mendalam dengan beberapa responden kunci
- b. mekanisme FGD dengan Peserta dan pelaksanaan FGD sebagai berikut:

Peserta	Pelaksanaan FGD
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua/Anggota Komisi DPRD yang menjadi mitra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;</li> <li>2. Asisten Daerah;</li> <li>3. BAPPEDA Kabupaten/Kota;</li> <li>4. Bagian Ekonomi, Setda;</li> <li>5. Bagian Hukum, Setda;</li> <li>6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD) atau sebutan lainnya;</li> <li>7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</li> <li>8. Dinas Sosial;</li> <li>9. Dinas Kesehatan;</li> <li>10. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;</li> <li>11. Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) atau sebutan lainnya;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitator menjelaskan tentang pertanyaan-pertanyaan dari indikator yang telah disusun;</li> <li>2. Fasilitator mempersilahkan kepada peserta untuk menanyakan hal-hal yang kurang jelas;</li> <li>3. Setelah tanya jawab sekitar 30 menit, kemudian fasilitator mempersilahkan para peserta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah disediakan;</li> <li>4. Peserta boleh mendiskusikan dengan para peserta lainnya yang berada dalam satu meja;</li> <li>5. Jawaban dari peserta, dapat berupa jawaban dari masing-masing peserta ataupun merupakan jawaban dari satu meja;</li> <li>6. Pendamping bertugas mencatat semua proses diskusi yang terjadi pada setiap meja.</li> <li>7. Setelah peserta melakukan pengisian kuesioner, tahapan selanjutnya adalah melakukan rekapitulasi jawaban responden yang diinput ke dalam Microsoft Excel. Jawaban responden diinput berdasarkan Dimensi Ekonomi, Dimensi Sosial Budaya, Dimensi Lingkungan, Dimensi Prasarana dan Sarana, dan Dimensi Kelembagaan sesuai dengan form isian yang tersedia.</li> </ol>

Peserta	Pelaksanaan FGD
<p>12. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 13. Dinas Perhubungan; 14. Dinas Perindustrian perdagangan koperasi dan UKM; 15. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; 16. BPN Kabupaten/Kota; 17. Camat; 18. Ketua Pokja Kawasan Terpadu Mandiri di Kabupaten; 19. Asosiasi bisnis misalnya Kamar Dagang Indonesia Daerah (KADINDA), Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) dan Perhimpunan Pengusaha Perjalanan Wisata (ASITA) (apabila komoditas unggulan berkaitan dengan sektor pariwisata) dll 20. Organisasi Masyarakat Madani (LSM, Ormas, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dlsb) 21. Perwakilan Perguruan Tinggi dan SMK setempat yang</p>	

Peserta	Pelaksanaan FGD
prodinya sesuai dengan komoditas unggulan 22. Pelaku seni dan budaya 23. Stakeholders lainnya sesuai kebutuhan.	

3.2.2. Pengumpulan Data Secara Daring dilakukan dengan menggunakan kuesioner berdasarkan dimensi, peubah, dan indikator sebagaimana terlampir.

Tabel 3.3. Tata Cara Pengolahan dan Analisis Data

No	Uraian
1.	Pengolahan Data 1. Data dari kuesioner dan hasil pengamatan dituangkan ke dalam tabel data; 2. Nilai gabungan dari masing masing indikator digunakan dengan cara penghitungan modus; dan 3. Justifikasi atau verifikasi dapat dilakukan oleh fasilitator terhadap beberapa indikator-indikator sesuai dengan hasil wawancara dan hasil pengamatan lapangan.
2.	Analisis data 1. Analisis data menggunakan software PRAPKPB yang berbasis multi dimensional scaling (MDS) 2. Analisis data berupa status perkembangan dimensi analisis atribut pengungkit ( <i>leverage attributes</i> ) dan ( <i>analisis montercarlo</i> ) 3. Penentuan bobot masing masing dimensi

Tabel 3.4. Tata Cara Penentuan Status KPB

No	Uraian
1.	Perhitungan Indeks KPB $I\text{-KPB} = \sum W_i \times D_i$ Dimana: IPKPB= Indeks Perkembangan Kawasan Perkotaan Baru $W_i$ = Bobot masing masing dimensi $D_i$ = Nilai masing masing dimensi
2.	Penentuan Status KPB a. Nilai I-KPB < 50 statusnya Berkembang; b. Nilai I-KPB $50 \leq$ I-KPB < 75 statusnya Mandiri; c. Nilai I-KPB $\geq$ 75 statusnya Berdaya Saing.

Tabel 3.5. Rekomendasi Indikasi Kegiatan Pengembangan KPB

No	Uraian
1.	Rekomendasi Indikasi Kegiatan disusun berdasarkan atribut pengungkit dari dimensi ekonomi, Sosial Budaya, Lingkungan, Jejaring Prasarana dan Sarana, dan Kelembagaan.
2.	Rekomendasi berupa Indikasi Kegiatan untuk masing masing dimensi dari hasil penilaian lapangan yang memuat acuan rencana kegiatan dalam jangka waktu tertentu

IV. INDEKS PENILAIAN KAWASAN TRANSMIGRASI

Tabel 4.1. Dimensi, Peubah, dan Indikator

No.	Peubah	Indikator
A. DIMENSI EKONOMI		
1.	Pengembangan Komoditas Unggulan Kawasan Transmigrasi	Komoditas unggulan belum dikembangkan
		Komoditas unggulan sudah dikembangkan namun masih parsial (produksi saja, pengolahan saja, atau pemasaran saja)
		Komoditas unggulan sudah dikembangkan secara terpadu dari produksi, pengolahan dan pemasaran
		Komoditas unggulan sudah dikembangkan secara terpadu dari produksi, pengolahan sampai pemasaran dan berkaitan dengan sektor lain
2.	Pelibatan Masyarakat dan UMKM dalam Pengembangan Komoditas Unggulan	Hanya sebagian kecil masyarakat (kurang dari 25%), koperasi dan UMKM yang terlibat dalam pengembangan komoditas unggulan secara terorganisir oleh klaster
		Sekitar 25% - 50% masyarakat, koperasi dan UMKM dilibatkan dalam pengembangan komoditas unggulan secara terorganisir oleh klaster
		Lebih dari 50% masyarakat, koperasi dan UMKM dilibatkan dalam pengembangan komoditas unggulan secara terorganisir oleh klaster
3.	Peran BUM Desa dan atau BUM Desa bersama Mengembangkan Komoditas Unggulan	BUM Desa dan atau BUM Desa bersama belum mendukung pengembangan komoditas unggulan
		BUM Desa dan atau BUM Desa bersama sudah mendukung pengembangan komoditas unggulan tapi masih parsial
		BUM Desa dan atau BUM Desa bersama sudah mengembangkan komoditas unggulan sudah secara terpadu dari produksi, pengolahan sampai pemasaran dan berkaitan dengan sektor lainnya
4.	Pengembangan Jejaring Kawasan Transmigrasi/klaster	Tidak ada keterkaitan antara kawasan transmigrasi/klaster/kawasan perdesaan dengan kawasan lainnya dalam rangka pengembangan komoditas unggulan

No.	Peubah	Indikator
		<p>Ada keterkaitan antara kawasan transmigrasi/klaster/kawasan perdesaan dengan kawasan lainnya dalam rangka pengembangan komoditas unggulan walaupun belum berkembang dengan baik</p> <p>Ada keterkaitan antara kawasan transmigrasi/klaster/kawasan perdesaan dengan kawasan lainnya dalam rangka pengembangan komoditas unggulan dan sudah berkembang dengan baik</p>
5.	Promosi Komoditas Unggulan oleh Kawasan Transmigrasi/Klaster	<p>Kawasan transmigrasi belum mempromosikan komoditas unggulan</p> <p>Kawasan transmigrasi sudah mempromosikan komoditas unggulan dalam skala lokal (kabupaten/kota dan provinsi)</p> <p>Kawasan transmigrasi sudah mempromosikan komoditas unggulan dalam skala nasional</p> <p>Kawasan transmigrasi sudah mempromosikan komoditas unggulan dalam skala internasional</p>
6.	Sertifikasi/Standarisasi Produk yang Dihasilkan	<p>Produk yang dihasilkan belum mempunyai standard/sertifikasi baik nasional maupun internasional</p> <p>Produk yang dihasilkan sudah memiliki sertifikasi/standarisasi aras nasional</p> <p>Produk yang dihasilkan sudah memiliki sertifikasi/standarisasi aras internasional</p>
7.	Tingkat Melek Keuangan Masyarakat	<p>Sebagian besar (lebih dari 50%) masyarakat belum memanfaatkan jasa keuangan</p> <p>Sebagian besar (lebih dari 50%) sudah memanfaatkan jasa perbankan namun belum memanfaatkan jasa kredit untuk usaha</p> <p>Sebagian besar (lebih dari 50%) sudah memanfaatkan jasa perbankan dan sudah memanfaatkan jasa kredit untuk usaha</p>
8.	Kepemilikan dan/atau Penguasaan Lahan	<p>Hampir 50% lebih lahan di kawasan dikuasai oleh penduduk dari luar kawasan</p> <p>Sekitar 25% - 50% lebih lahan di kawasan dikuasai oleh penduduk dari luar kawasan</p>

No.	Peubah	Indikator
		Kurang dari 25% lahan di kawasan dikuasai oleh penduduk dari luar kawasan
<b>B. DIMENSI SOSIAL BUDAYA</b>		
1.	Kreativitas Masyarakat	Masyarakat masih belum ada kreativitas mengembangkan komoditas unggulan Kurang dari 50% masyarakat sudah mempunyai kreativitas mengembangkan komoditas unggulan Lebih dari 50% masyarakat sudah mempunyai kreativitas mengembangkan komoditas unggulan
2.	Pelibatan Pelaku Seni dan Budaya	Pelaku seni dan budaya tidak dilibatkan dalam pengembangan komoditas unggulan dan kawasan Pelaku seni dan budaya sudah dilibatkan dalam pengembangan komoditas unggulan dan kawasan namun belum efektif Pelaku seni dan budaya sudah dilibatkan dalam pengembangan komoditas unggulan dan kawasan dan sudah efektif/optimal
3.	Pemanfaatan Produk Budaya Masyarakat	Produk budaya masyarakat lokal belum dimanfaatkan dalam rangka pengembangan komoditas unggulan Produk budaya masyarakat lokal sudah dimanfaatkan secara komersial dalam rangka pengembangan komoditas unggulan namun belum optimal Produk budaya masyarakat lokal sudah dimanfaatkan secara industrialisasi dalam rangka pengembangan komoditas unggulan secara optimal
4.	Migrasi Penduduk Keluar Kawasan	Lebih dari 25% dari kawasan transmigrasi bermigrasi ke luar kabupaten untuk mencari nafkah Sekitar 10% - 25% dari kawasan transmigrasi bermigrasi ke luar kabupaten untuk mencari nafkah Kurang dari 10% dari kawasan transmigrasi bermigrasi ke luar kabupaten untuk mencari nafkah

No.	Peubah	Indikator
5.	Governansi Budaya	<p>Keterlibatan warga dalam pengelolaan institusi budaya, program dan acara, baik secara langsung maupun melalui organisasi masyarakat madani, bukanlah salah satu prioritas atau sasaran kebijakan budaya lokal</p> <p>Keterlibatan warga dalam pengelolaan institusi budaya, program dan acara, baik secara langsung maupun melalui organisasi masyarakat madani, baru sebagian menjadi salah satu prioritas atau sasaran kebijakan budaya lokal</p> <p>Keterlibatan warga dalam pengelolaan institusi budaya, program dan acara, baik secara langsung maupun melalui organisasi masyarakat madani, sudah menjadi salah satu prioritas atau sasaran kebijakan budaya lokal</p>
6.	Budaya dan Pendidikan	<p>Budaya lokal tidak diajarkan baik dalam sekolah formal maupun informal di kawasan tersebut</p> <p>Budaya lokal diajarkan baik dalam sekolah formal maupun informal di kawasan tersebut</p> <p>Pendidikan informal dan formal, asosiasi dan dunia usaha bersama-sama melakukan pelestarian dan penciptaan budaya lokal, dan menampilkannya dalam kalender budaya kawasan tersebut</p>
7.	Budaya, Informasi dan Pengetahuan	<p>Tidak ada kebijakan atau program dari pemerintah dan dunia usaha/masyarakat untuk melibatkan masyarakat dalam menciptakan, memproduksi dan mendistribusikan secara digital</p> <p>Terdapat kebijakan atau program dari pemerintah dan swasta/masyarakat untuk melibatkan masyarakat dalam menciptakan, memproduksi dan mendistribusikan secara digital namun belum efektif</p> <p>Terdapat kebijakan atau program dari pemerintah dan swasta/masyarakat untuk melibatkan masyarakat dalam menciptakan, memproduksi dan mendistribusikan secara digital dan sudah efektif</p>
8.	Budaya dan Perencanaan	<p>Perencanaan kawasan ataupun master plan pembangunan kawasan belum secara eksplisit merujuk kepada sumber-sumber dan permasalahan budaya</p>

No.	Peubah	Indikator
		<p>Perencanaan kawasan ataupun master plan pembangunan kawasan sudah secara eksplisit merujuk kepada sumber-sumber dan permasalahan budaya walaupun baru sebagian</p> <p>Perencanaan kawasan ataupun master plan pembangunan kawasan sudah secara keseluruhan dan eksplisit telah merujuk kepada sumber-sumber dan permasalahan budaya</p>
9.	Budaya, Kesetaraan dan Inklusi Sosial	<p>Fasilitas budaya dan ruang publik tidak didesain dengan mempertimbangkan eksistensi, aktualitas, aksesibilitas untuk seluruh lapisan masyarakat (misalnya untuk difable)</p> <p>Fasilitas budaya dan ruang publik baru sebagian didesain dengan mempertimbangkan eksistensi, aktualitas, aksesibilitas untuk seluruh lapisan masyarakat</p> <p>Fasilitas budaya dan ruang publik seluruhnya sudah didesain dengan mempertimbangkan eksistensi, aktualitas, aksesibilitas untuk seluruh lapisan masyarakat</p>
10.	Kerekatan Sosial	<p>Masyarakat di kawasan satu sama lain belum merasa menjadi masyarakat yang satu di kawasan tersebut dan apabila terjadi konflik maka tidak ada mekanisme resolusi konflik yang baik</p> <p>Masyarakat di kawasan satu sama lain belum seluruhnya merasa menjadi masyarakat yang satu di kawasan tersebut dan apabila terjadi konflik maka baru ada sedikit mekanisme resolusi konflik yang baik</p> <p>Masyarakat di kawasan satu sama lain sudah seluruhnya merasa menjadi masyarakat yang satu di kawasan tersebut dan apabila terjadi konflik maka sudah ada mekanisme resolusi konflik yang baik</p>
<b>C. DIMENSI LINGKUNGAN</b>		
1.	Pembangunan Kawasan Transmigrasi mengacu pada Tata Ruang Kawasan Transmigrasi	<p>Belum ada penetapan tata ruang kawasan</p> <p>Ada dokumen penetapan tata ruang Kawasan Transmigrasi</p> <p>Ada dokumen penetapan tata ruang dan dijadikan acuan dalam perencanaan, pengawasan dan pengendalian Pembangunan Kawasan Transmigrasi/Perdesaan</p>

No.	Peubah	Indikator
2.	Ruang Terbuka Hijau (RTH)	RTH kurang dari 10% RTH antara 10% - 20% RTH antara 20% - 30% RTH lebih dari 30%
3.	Pemanfaatan <i>Amenity Resources</i> untuk Kegiatan Ekonomi dan Sosial	Belum ada pemanfaatan <i>amenity resources</i> untuk kegiatan ekonomi dan sosial Sudah ada pemanfaatan <i>amenity resources</i> untuk kegiatan ekonomi dan sosial tapi belum optimal Sudah ada pemanfaatan <i>amenity resources</i> untuk kegiatan ekonomi dan sosial sudah optimal
4.	Kesadaran Masyarakat terhadap permasalahan dan pemanfaatan lingkungan	Masyarakat belum memiliki kesadaran dan pemahaman tentang permasalahan dan pemanfaatan lingkungan Masyarakat sudah memiliki kesadaran dan pemahaman tentang permasalahan dan pemanfaatan lingkungan Masyarakat sudah memiliki kesadaran dan pemahaman tentang permasalahan dan pemanfaatan lingkungan serta mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari Masyarakat sudah memiliki kesadaran dan pemahaman tentang permasalahan dan pemanfaatan lingkungan serta menuangkan ke dalam aturan (tidak tertulis dan/atau tertulis) dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari
5.	Adaptasi terhadap perubahan iklim	Kegiatan ekonomi utama meningkatkan kerentanan terhadap resiko terhadap perubahan iklim Kegiatan ekonomi utama sudah adaptif terhadap perubahan iklim namun belum optimal Kegiatan ekonomi utama sudah adaptif terhadap perubahan iklim
6.	Kapasitas Mitigasi Bencana	Ada resiko bencana tapi belum ada upaya mitigasi Ada resiko bencana dan sudah ada rencana untuk mitigasi Ada resiko bencana, dan mitigasi yang terstruktur dalam kebijakan program dan anggaran

No.	Peubah	Indikator
7.	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah	Tidak ada TPS dan tidak ada sistem pengelolaan sampah Ada TPS tapi masyarakat tidak membuang sampah di TPS Ada TPS dan ada sistem penanganan sampah Ada TPS, sistem penanganan dan pengelolaan sampah
8.	Pengelolaan dan Pemanfaatan Limbah	Limbah dari kegiatan ekonomi utama dibiarkan tanpa pengelolaan Limbah dari kegiatan ekonomi utama sudah dikelola tapi belum optimal Limbah dari kegiatan ekonomi utama sudah dikelola dan dimanfaatkan
<b>D. DIMENSI JEJARING PRASARANA DAN SARANA</b>		
1.	Konektivitas Kawasan Transmigrasi dengan kota kecil/menengah (pusat pertumbuhan) yang hirarkhi keruangannya lebih tinggi	Kawasan Transmigrasi belum terhubung dengan kota kecil/menengah terdekat Kawasan Transmigrasi sudah terhubung dengan kota kecil/menengah terdekat namun kondisi jalan lebih dari 50% masih buruk (tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda 4/lebih) Kawasan Transmigrasi sudah terhubung dengan kota kecil/menengah terdekat dan lebih dari 50% kondisi jalan dalam keadaan baik (bisa dilalui oleh kendaraan roda 4/lebih kecuali cuaca tertentu) Kawasan Transmigrasi sudah terhubung dengan kota kecil/menengah terdekat dan lebih dari 50% kondisi jalan dalam keadaan baik (bisa dilalui oleh kendaraan roda 4/lebih dalam segala cuaca)
2.	Konektivitas Antar SKP dalam Kawasan Transmigrasi dan antara kawasan transmigrasi dengan pusat pertumbuhan yang hierarkhinya lebih tinggi	Antar PPLT/Pusat SKP dalam Kawasan Transmigrasi belum seluruhnya terhubung dengan prasarana jalan seluruh PPLT/Pusat SKP dalam Kawasan Transmigrasi sudah terhubung dengan prasarana jalan namun kondisi jalan lebih dari 50% masih buruk (tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda 4/lebih) Seluruh PPLT/Pusat SKP dalam Kawasan Transmigrasi sudah terhubung dengan prasarana jalan dan lebih dari 50% kondisi jalan dalam keadaan baik (bisa dilalui oleh kendaraan roda 4/lebih kecuali cuaca tertentu) Seluruh PPLT/Pusat SKP dalam Kawasan Transmigrasi sudah terhubung prasarana jalan dan sudah terhubung dengan PPKT/KPB dan lebih dari

No.	Peubah	Indikator
		50% kondisi jalan dalam keadaan baik (bisa dilalui oleh kendaraan roda 4/lebih dalam segala cuaca)
3.	Sekolah Menengah Kejuruan	<p>Tidak ada SMK di sekitar lokasi kawasan transmigrasi yang ditetapkan</p> <p>Ada SMK di sekitar lokasi kawasan transmigrasi yang ditetapkan namun tidak ada program studi yang berkaitan dengan komoditas unggulan</p> <p>Ada SMK di sekitar lokasi kawasan transmigrasi yang ditetapkan dan ada program studi yang berkaitan dengan komoditas unggulan namun lulusannya sebagian besar tidak bekerja di kawasan</p> <p>Ada SMK di sekitar lokasi kawasan transmigrasi yang ditetapkan dan ada program studi yang berkaitan dengan komoditas unggulan dan lulusannya sebagian besar bekerja di kawasan</p>
4.	Pelayanan Pendidikan Vokasi dan Ketrampilan	<p>Tidak ada pelayanan pendidikan yang melatih masyarakat di kawasan transmigrasi yang ditetapkan</p> <p>Ada pelayanan pendidikan yang melatih masyarakat di kawasan transmigrasi yang ditetapkan namun belum berkaitan dengan komoditas unggulan</p> <p>Ada pelayanan pendidikan yang melatih masyarakat di kawasan transmigrasi yang ditetapkan dan berkaitan dengan komoditas unggulan</p>
5.	Aksesibilitas ke dan dari Kawasan serta ke Sentra Komoditas Unggulan	<p>Alat transportasi tidak dapat mengakses dari dan ke kawasan transmigrasi</p> <p>Alat transportasi dapat mengakses dari dan ke kawasan transmigrasi</p> <p>Alat transportasi dapat mengakses dari dan ke kawasan transmigrasi dan ke sentra komoditas unggulan dan/atau non unggulan</p>
6.	Angkutan Umum	<p>Tidak ada angkutan umum yang melalui kawasan transmigrasi</p> <p>Ada angkutan umum dengan trayek tidak tetap</p> <p>Ada angkutan umum ada trayek tetap tapi tidak setiap hari</p> <p>Ada angkutan umum trayek tetap dan setiap hari</p>
7.	Elektrifikasi Kawasan Transmigrasi	<p>Kurang dari 25% dari jumlah desa yang ada di kawasan transmigrasi sudah dialiri listrik</p> <p>26% - 50% dari jumlah desa yang ada di kawasan transmigrasi sudah dialiri listrik</p>

No.	Peubah	Indikator
		51% - 75% dari jumlah desa yang ada di kawasan transmigrasi sudah dialiri listrik >75% dari jumlah desa yang ada di kawasan transmigrasi sudah dialiri listrik
8.	Pemanfaatan alat komunikasi dan Internet	Sebagian besar masyarakat belum dapat mengakses alat komunikasi dan internet Sebagian besar masyarakat sudah dapat mengakses internet namun belum dimanfaatkan untuk pengembangan Komoditas unggulan, misalnya untuk promosi komoditas unggulan Sebagian besar masyarakat sudah dapat mengakses internet dan sudah dimanfaatkan untuk pengembangan Komoditas unggulan, misalnya untuk promosi komoditas unggulan
9.	Sumber Air Minum dan Mandi/Cuci Masyarakat di Kawasan Transmigrasi	Air hujan Sungai/danau/kolam Mata Air Sumur Sumur Bor/pompa PAM/Ledeng/air kemasan
10.	Ketersediaan Bahan Bakar	Tidak ada SPBU dan atau penyedia BBG Ada SPBU dan atau penyedia BBG namun tidak tersedia sepanjang waktu Ada SPBU dan atau penyedia BBG namun tidak tersedia sepanjang waktu
11.	Kios Sarana Produksi Pertanian	Di dalam dan sekitar kawasan tidak terdapat kios saprodi yang berkaitan dengan komoditas unggulan Di dalam dan sekitar kawasan sudah ada kios saprodi yang berkaitan dengan komoditas unggulan namun tidak lengkap Di dalam dan sekitar kawasan sudah ada kios saprodi yang berkaitan dengan komoditas unggulan dan lengkap

No.	Peubah	Indikator
12.	Pasar Kawasan Transmigrasi	Tidak ada pasar kawasan Sudah ada pasar kawasan namun masih belum memasarkan komoditas unggulan Sudah ada pasar kawasan yang memasarkan produk komoditas unggulan tapi omset pemasaran per bulan masih kecil Sudah ada pasar kawasan yang memasarkan produk komoditas unggulan dan omset pemasaran per bulan sudah besar/banyak
13.	Perbankan dan/atau Lembaga Keuangan Bukan Bank Untuk Pengembangan Komoditas Unggulan	Tidak ada fasilitas bank/LKBB di dalam dan sekitar kawasan Sudah ada fasilitas bank/LKBB di dalam dan sekitar kawasan namun sebagian besar masyarakat masih belum memanfaatkan kredit perbankan untuk pengembangan komoditas unggulan Sudah ada fasilitas bank/LKBB di dalam dan sekitar kawasan dan sebagian besar masyarakat sudah memanfaatkan kredit perbankan untuk pengembangan komoditas unggulan
E. DIMENSI KELEMBAGAAN		
1.	Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Norma Masyarakat dalam Meminimalisasi Alih Fungsi Lahan	Tidak ada kebijakan pemerintah kabupaten/kota dan/atau norma masyarakat Ada kebijakan pemerintah kabupaten/kota atau norma masyarakat tapi belum efektif Ada kebijakan pemerintah kabupaten/kota atau norma masyarakat dan sudah efektif Ada kebijakan pemerintah kabupaten/kota dan norma masyarakat dan sudah efektif
2.	Kebijakan Daerah tentang Penggunaan Tenaga Kerja Lokal	Tidak ada kebijakan daerah (pemerintah kabupaten/kota) Ada kebijakan daerah (pemerintah kabupaten/kota) tapi belum efektif Ada kebijakan daerah (pemerintah kabupaten/kota) dan sudah efektif

No.	Peubah	Indikator
3.	Pengembangan Kawasan Transmigrasi/Klaster Berbasis Komoditas Unggulan	<p>Klaster berbasis komoditas unggulan belum dibentuk oleh masyarakat</p> <p>Klaster berbasis komoditas unggulan sudah dibentuk oleh masyarakat namun belum dapat mengembangkan komoditas unggulan dengan optimal</p> <p>Klaster berbasis komoditas unggulan sudah dibentuk oleh masyarakat dan sudah mengembangkan komoditas unggulan terpadu dari produksi, pengolahan dan pemasaran</p>
4.	Insentif/Kebijakan Daerah tentang Investasi di Kawasan	<p>Tidak ada kebijakan pemberian insentif</p> <p>Ada kebijakan pemberian insentif tapi belum efektif</p> <p>Ada kebijakan pemberian insentif dan sudah efektif</p>
5.	Forum Pengembangan (Ekonomi) Daerah/Kawasan Transmigrasi di Aras Kabupaten/Kota	<p>Tidak ada forum pengembangan ekonomi daerah di aras kabupaten/kota</p> <p>Ada forum pengembangan ekonomi daerah di aras kabupaten/kota tapi belum efektif dalam memberikan masukan kebijakan pengembangan kawasan</p> <p>Ada forum pengembangan ekonomi daerah di aras kabupaten/kota dan sudah efektif dalam memberikan masukan kebijakan pengembangan kawasan</p>
6.	Kebijakan Daerah dalam Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang telah Ditetapkan	<p>Tidak ada kebijakan daerah baik dalam RTRWK dan atau RPJMD tentang pengembangan kawasan transmigrasi yang telah ditetapkan</p> <p>Sudah ada kebijakan daerah baik dalam RTRWK dan atau RPJMD tapi belum dijadikan acuan dalam pembangunan transmigrasi</p> <p>Sudah ada kebijakan daerah baik dalam RTRWK dan atau RPJMD dan sudah dijadikan acuan dalam pembangunan transmigrasi</p>
7.	Komitmen Daerah untuk Pembiayaan Kawasan yang telah Ditetapkan	<p>Tidak ada komitmen daerah dalam mendanai pembangunan kawasan transmigrasi yang telah ditetapkan</p> <p>Ada komitmen daerah dalam mendanai pembangunan kawasan transmigrasi yang telah ditetapkan namun masih belum signifikan (relative kecil yaitu kurang dari 50% dari rencana anggaran biaya yang ditetapkan)</p>

No.	Peubah	Indikator
		Ada komitmen daerah dalam mendanai pembangunan kawasan transmigrasi yang telah ditetapkan namun masih terlalu signifikan (antara 50% - 75% dari rencana anggaran biaya yang ditetapkan)
		Ada komitmen daerah dalam mendanai pembangunan kawasan transmigrasi yang telah ditetapkan yang sudah signifikan (lebih dari 75% dari rencana anggaran biaya yang ditetapkan)
8.	Kebijakan Daerah tentang CSR untuk Kawasan Transmigrasi yang telah Ditetapkan	Tidak ada kebijakan daerah tentang pengaturan CSR
		Ada kebijakan daerah tentang pengaturan CSR tapi belum efektif
		Ada kebijakan daerah tentang pengaturan CSR dan sudah efektif
9.	Pengembangan Kerjasama antara Pemerintah Daerah, BUM Desa/BUM Desa bersama, Dunia Usaha dan Perguruan Tinggi/Lembaga Penelitian setempat untuk Meningkatkan Inovasi Pengembangan Komoditas Unggulan	Tidak ada kerjasama antara pemerintah daerah, BUM Desa/BUM Desa bersama, dunia usaha dengan PT/LP setempat untuk mendorong inovasi pengembangan komoditas unggulan
		Sudah ada kerjasama antara pemerintah daerah, BUM Desa/BUM Desa bersama, dunia usaha dengan PT/LP setempat namun belum mendorong inovasi pengembangan Komoditas Unggulan
		Sudah ada kerjasama antara pemerintah daerah, BUM Desa/BUM Desa bersama, dunia usaha dengan PT/LP setempat dan sudah menghasilkan inovasi pengembangan Komoditas Unggulan
10.	Kebijakan Daerah tentang Promosi Kawasan	Tidak ada kebijakan daerah tentang promosi kawasan yang telah ditetapkan
		Sudah ada kebijakan daerah tentang promosi kawasan yang telah ditetapkan namun baru skala lokal
		Sudah ada kebijakan daerah tentang promosi kawasan yang telah ditetapkan namun baru skala nasional
		Sudah ada kebijakan daerah tentang promosi kawasan yang telah ditetapkan dan skala internasional
11	Badan pengelola kawasan yang berfungsi mengelola Kawasan Transmigrasi secara menyeluruh dari berbagai aspek	Belum ada badan pengelola kawasan
		Sudah ada badan pengelola kawasan namun belum berfungsi
		Sudah ada badan pengelola kawasan namun hanya berfungsi untuk mengelola Kawasan Perkotaan Baru

No.	Peubah	Indikator
		Sudah ada badan pengelola kawasan yang berfungsi sebagai badan pengelola Kawasan Transmigrasi secara menyeluruh

Tabel 4.2. Tata Cara pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam rangka pengukuran indeks perkembangan Kawasan Transmigrasi dilakukan secara luring dan daring.

4.2.1. Pengumpulan Data Secara Luring dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. fasilitator melakukan survei lapangan keseluruhan Kawasan Transmigrasi sebelum dilaksanakannya FGD dengan melakukan peninjauan/pengamatan lapangan dan wawancara secara mendalam dengan beberapa responden kunci
- b. mekanisme FGD dengan Peserta dan pelaksanaan FGD sebagai berikut:

Peserta	Pelaksanaan FGD
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua/Anggota Komisi DPRD yang menjadi mitra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;</li> <li>2. Asisten Daerah;</li> <li>3. BAPPEDA Kabupaten/Kota;</li> <li>4. Bagian Ekonomi, Setda;</li> <li>5. Bagian Hukum, Setda ;</li> <li>6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD) atau sebutan lainnya;</li> <li>7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</li> <li>8. Dinas Sosial;</li> <li>9. Dinas Kesehatan;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitator menjelaskan tentang pertanyaan-pertanyaan dari indikator yang telah disusun dalam kuesioner</li> <li>2. Fasilitator mempersilahkan kepada peserta untuk menanyakan hal-hal yang kurang jelas;</li> <li>3. Setelah tanya jawab sekitar 30 menit, kemudian fasilitator mempersilahkan para peserta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah disediakan;</li> <li>4. Peserta boleh mendiskusikan dengan para peserta lainnya yang berada dalam satu meja;</li> <li>5. Jawaban dari peserta, dapat berupa jawaban dari masing-masing peserta ataupun merupakan jawaban dari satu meja;</li> <li>6. Pendamping bertugas mencatat semua proses diskusi yang terjadi pada setiap meja.</li> <li>7. Setelah peserta melakukan pengisian kuesioner, tahapan selanjutnya adalah melakukan rekapitulasi jawaban responden</li> </ol>

Peserta	Pelaksanaan FGD
<p>10. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;</p> <p>11. Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) atau sebutan lainnya;</p> <p>12. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;</p> <p>13. Dinas Perhubungan;</p> <p>14. Dinas Pertanian (apabila komoditas unggulan berkaitan dengan sektor pertanian);</p> <p>15. Dinas Kelautan dan Perikanan (apabila komoditas unggulan berkaitan dengan sektor perikanan);</p> <p>16. Dinas Pariwisata (apabila komoditas unggulan berkaitan dengan sektor pariwisata);</p> <p>17. Dinas Perindustrian perdagangan koperasi dan UKM;</p> <p>18. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;</p> <p>19. BPN Kabupaten/Kota;</p> <p>20. Camat;</p> <p>21. Ketua Pokja Kawasan Terpadu Mandiri di Kabupaten;</p> <p>22. Asosiasi bisnis misalnya Kamar Dagang Indonesia Daerah (KADINDA), Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) dan Perhimpunan Pengusaha Perjalanan Wisata (ASITA) (apabila komoditas unggulan berkaitan dengan sektor pariwisata) dll</p>	<p>yang diinput ke dalam Microsoft Excel. Jawaban responden diinput berdasarkan Dimensi Ekonomi, Dimensi Sosial Budaya, Dimensi Lingkungan, Dimensi Prasarana dan Sarana, dan Dimensi Kelembagaan sesuai dengan form isian yang tersedia.</p>

Peserta	Pelaksanaan FGD
23. Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) dan atau Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI)	
24. Organisasi Masyarakat Madani (LSM, Ormas, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dlsb)	
25. Perwakilan Perguruan Tinggi dan SMK setempat yang prodinya sesuai dengan komoditas unggulan	
26. Ketua kelompok perwakilan dari kawasan seperti kelompok tani/gabungan kelompok tani (POKTAN/GAPOKTAN), kelompok usaha perikanan (POKDAKAN), kelompok pengolahan dan pemasaran ikan (POKLAHSAR), kelompok sadar wisata (POKDARWIS), dlsb	
27. Pelaku seni dan budaya	
28. Stakeholders lainnya sesuai kebutuhan.	

4.2.2. Pengumpulan Data Secara Daring dilakukan dengan menggunakan kuesioner berdasarkan dimensi, peubah, dan indikator sebagaimana terlampir.

Tabel 4.3. Tata Cara Pengolahan dan Analisis Data

No	Uraian
1.	<p>Pengolahan Data</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Data dari kuesioner dan hasil pengamatan dituangkan ke dalam tabel data;</li> <li>b. Nilai gabungan dari masing masing indikator digunakan dengan cara penghitungan modus; dan</li> <li>c. Justifikasi atau verifikasi dapat dilakukan oleh fasilitator terhadap beberapa indikator-indikator sesuai dengan hasil wawancara dan hasil pengamatan lapangan.</li> </ul>
2.	<p>Analisis data</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Analisis data menggunakan software PRAPKTRANS yang berbasis multi dimensional scaling (MDS);</li> <li>b. Analisis data berupa status perkembangan dimensi analisis atribut pengungkit (<i>leverage attributes</i>) dan (<i>analisis montercarlo</i>); dan</li> <li>c. Penentuan bobot masing masing dimensi.</li> </ul>

Tabel 4.4. Tata Cara Penentuan Status Kawasan Transmigrasi

No	Uraian
1.	<p>Perhitungan Indeks Kawasan Transmigrasi</p> $IPKTrans = \sum W_i \times D_i$ <p>Dimana</p> <p>IPKTrans = Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi</p> <p><math>W_i</math> = Bobot masing masing dimensi</p> <p><math>D_i</math> = Nilai masing masing dimensi</p>
2.	<p>Penentuan Status Kawasan Transmigrasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Nilai IPKTrans &lt; 50 statusnya Berkembang;</li> <li>b. Nilai IPKTrans <math>50 \leq IPKTrans &lt; 75</math> statusnya Mandiri;</li> <li>c. Nilai IPKTrans <math>\geq 75</math> statusnya Berdaya Saing.</li> </ul>

Tabel 4.5. Rekomendasi Indikasi Kegiatan Pengembangan Kawasan Transmigrasi

No	Uraian
1.	Rekomendasi Indikasi Kegiatan disusun berdasarkan atribut pengungkit dari Dimensi Ekonomi, Sosial Budaya, Lingkungan, Jejaring Prasarana dan Sarana, dan Kelembagaan.
2.	Rekomendasi berupa Indikasi Kegiatan untuk masing masing dimensi dari hasil penilaian lapangan yang memuat acuan rencana kegiatan dalam jangka waktu tertentu.

MENTERI DESA,  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN  
TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDUL HALIM ISKANDAR

**Salinan sesuai aslinya**  
**Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi**  
**Kepala Biro Hukum**



**Teguh**

